SIP no. 440/J.1./64
Percetakan 68/63 10.00 ex
387/I51j/T/63

LAKSANAKAN KONSEKWEN

IR. SAKIRMAN

Ir. Sakirman

★

Kembali ke Dekon, Laksanakan Konsekwen Patriotisme Ekonomi

(Laporan Tambahan tentang soal² ekonomi kepada Sidang Pleno ke-II CCPKI jang diperluas dengan Komisi Verifikasi dan Komisi Kontrol Central, di Djakarta tanggal 23-26 Desember 1963).

Jajasan „Pembaruan"
Djakarta 1964



rentjana kulit: Yap.

Isi

I Situasi ekonomi jang parah akibat penjelewengan Peraturan² Ekonomi 26 Mei 7

II Memenangkan konfrontasi ekonomi terhadap „Malaysia" 12

III Laksanakan garis Manipol dibidang perdagangan luar dan dalamnegeri 18

IV Atasi krisis beras 24

V Atasi kematjetan produksi dan komunikasi 33

VI Tolak „Bantuan" dari manapun jang merugikan Indonesia 39

VII Teruskan pembangunan berentjana jang demokratis dan patriotik 44

Kawan Ketua,
Kawan² Pimpinan, dan
Kawan² lainnja jang tertjinta,

Saja per-tama² menjatakan persetudjuan saja atas seluruh isi Laporan Politik Kawan Ketua jang telah disampaikan kepada Sidang Pleno ke-II CC ini. Saja djuga dapat menerima dan menjetudjui sepenuhnja kebidjaksanaan jang telah dilakukan oleh Pimpinan Partai selama periode antara Sidang Pleno ke-I dan Sidang Pleno ke-II.

Saja akan memberikan Laporan Tambahan jang berisi pada pokoknja perintjian lebih landjut mengenai soal² ekonomi, dengan memberikan perhatian chusus kepada beberapa segi perkembangan ekonomi nasional kita pada waktu² belakangan ini.

I

SITUASI EKONOMI JANG PARAH AKIBAT PENJELEWENGAN PERATURAN² EKONOMI 26 MEI

Waktu 7 bulan adalah sangat pendek dalam sedjarah, dan lebih pendek lagi bagi konseptor² Peraturan² Ekonomi 26 Mei. Para konseptor dan arsitek, begitu djuga para pembela jang setia daripada Peraturan² Ekonomi 26 Mei tidak pernah memimpikan bahwa Peraturan² Ekonomi 26 Mei jang mereka gembar-gemborkan sebagai „peraturan² untuk melaksanakan DEKON", hanja berumur 7 bulan, tidak lebih dan tidak kurang. Dan inipun djika kita pakai ukuran² formil juridis berdasarkan keterangan Pemerintah didepan Sidang Pleno DPR-GR tanggal 12 Desember 1963 jang baru lalu. Presiden Sukarno sendiri telah lebih dulu, jaitu dalam sidang PB FN pada tanggal 5-6 September 1963 jang lalu menjatakan pendapatnja dapat menjetudjui keputusan Sidang Pleno PB FN itu untuk mengubah Peraturan² Ekonomi 26 Mei.

Belum pernah terdjadi dalam sedjarah perkembangan ekonomi Indonesia, bahwa dalam waktu 7 bulan situasi ekonomi kita telah mengalami kekatjauan² dan kerusakan² jang begitu hebatnja dengan akibat²nja jang sangat luas dan mendalam. Hal ini disebabkan, karena berbeda dengan banjak peraturan² jang telah dia-

dakan selama beberapa tahun terachir ini, seperti peraturan² SIVA, peraturan² Oktober 1962 dan lain², Peraturan² 26 Mei bukanlah suatu tindakan moneter konvensionil se-mata², akan tetapi sudah djauh melampaui batas² „wewenang" konsepsi konvensionil jang klasik, disebabkan karena peraturan² itu : **Pertama :** Memberikan dasar jang legal sekaligus kepada tindakan devaluasi resmi dan devaluasi de fakto, sehingga nilai tukar rupiah kita mendjadi sangat merosot dan akan terus merosot dalam ukuran² jang tidak ada taranja dalam sedjarah. Devaluasi resmi ini dilakukan lewat apa jang dinamakan perangsang rupiah bagi kaum exportir dan pungutan HPN (Hasil Perdagangan Negara) atas barang² import sebanjak Rp. 270,— untuk setiap AS $, schingga kurs resmi dan legal rupiah kita terhadap AS $ mendjadi sama dengan Rp. 270,— + Rp. 45,— = Rp. 315,—. Devaluasi de fakto dilakukan lewat HPN tambahan sebanjak Rp. 225,— untuk barang² golongan II dan Rp. 495,— untuk barang² golongan III, dan lewat beamasuk sebanjak 50% dan 100% bagi masing² golongan itu. Dengan begitu, maka harga import barang² golongan I sekalipun tidak dikenakan HPN tambahan dan bea masuk, barang² golongan I seperti beras, harganja mendjadi 7 kali lipat dibandingkan dengan harga sebelum berlakunja Peraturan² Ekonomi 26 Mei. Sedangkan, dengan pengetahuan sederhana dapat dibuat perhitungan, bahwa harga import (landed cost) barang² golongan II, misalnja sebuah motor disel dengan kekuatan 40 tk., djika diimport dengan devisen retensi dari exportir, bisa mentjapai sekurang²nja Rp. 2.000,— untuk setiap dolar, sehingga kurs efektif untuk setiap dolar meningkat mendjadi **45 kali lipat dibanding kurs resmi** sebelum berlakunja Peraturan² 26 Mei itu.

Kedua : Membukakan pintu jang se-lebar²nja bagi PDN³ untuk mendjalankan politik liberalisasi harga sehingga praktis kedudukan PDN³ merosot mendjadi sama dengan perusahaan² dagang „swasta" jang spekulatif, dan langsung menjerang prinsip² ekonomi terpimpin sebagaimana telah dirumuskan dalam Manipol dan Dekon. PDN³ bukan sadja diperbolehkan, malahan diharuskan mengedjar harga pasaran bebas jang spekulatif sampai kepada tingkat sekurang²nja 70% dari harga pasaran bebas itu. Dalam prakteknja ini berarti bahwa kaum kapitalis birokrat dalam PDN³ diberi kebebasan main kongkalikong dengan tukang² tjatut untuk mendorong harga barang³ golongan II dan golongan III sampai setinggi langit dengan akibat sangat merugikan Rakjat banjak, terutama kaum konsumen miskin dan hanja menguntungkan kaum kapitalis monopoli asing, kaum komprador, kaum kapitalis birokrat dan kaum spekulan.

Ketiga : Menetapkan politik tarif jang kedjam dengan menaikkan setjara resmi tarif² listrik, angkutan dilaut, darat dan udara dengan 300-400% sehingga sangat mendorong lebih pesat lagi membubungnja harga³ dan memperhebat inflasi terbuka.

Inilah isi dan djiwa jang sesungguhnja daripada teror Peraturan² Ekonomi 26 Mei jang dengan tepat sekali telah disimpulkan oleh Politbiro CC Partai dalam pernjataannja pada tanggal 3 Djuni 1963 jang lalu : devaluasi, liberalisasi dan kenaikan harga³.

Berdasarkan pengalaman Rakjat sendiri di-waktu² jang lampau jang sangat pahit mengenai tindakan² moneter Pemerintah dan berdasarkan analisa jang ilmiah mengenai arah perkembangan moneter jang pasti akan timbul setelah berlakunja Peraturan² 26 Mei itu, maka Partai telah mengambil sikap jang tepat pula untuk menolak penjelewengan Peraturan² 26 Mei itu. Tindakan² moneter konvensionil jang se-mata² dimaksudkan untuk melegalisasi devaluasi, liberalisasi dan kenaikan harga³ dengan lontjatan³ jang tinggi itu adalah suatu perbuatan teror dibidang ekonomi dan keuangan, jang memang dikehendaki oleh kaum imperialis Amerika Serikat sesuai dengan apa jang dinamakan „program stabilisasi ekonomi", suatu tindakan jang akan meratakan djalan untuk mendjamin lebih tergantungnja lagi ekonomi Indonesia kepada kaum imperialis Amerika Serikat.

Kebenaran sikap Partai kita untuk menolak mentah² Peraturan² Ekonomi 26 Mei dan bukti² kegagalan total daripada „program stabilisasi ekonomi" kaum imperialis itu telah lebih diperkuat lagi oleh fakta³ dan kenjataan³ daripada praktek³ peraturan itu selama 7 bulan belakangan ini.

Uang jang beredar jang menurut taksiran pada achir tahun 1961 berdjumlah lebih kurang Rp. 67 miljard, telah meningkat pada achir tahun 1962 mendjadi tidak kurang dari Rp. 130 miljard dan sekarang pada achir tahun 1963 menurut perkiraan tidak berkurang malahan sebaliknja bertambah mendjadi lebih dari Rp. 200 miljard, sedangkan defisit Anggaran Pembeajaan Negara jang direntjanakan sebanjak Rp. 33,4 miljard menurut perkiraan telah meningkat sampai 4 kali lipat.

Dibidang harga barang³ kebutuhan pokok misalnja index harga beras 2.607 pada bulan Djanuari, telah mendjadi 7.564 dalam bulan Desember tahun 1963 ini, berdasarkan index 1955 = 100. Djadi dalam tempo satu tahun harga beras telah meningkat mendjadi 3 kali lipat. Ini semua adalah angka² resmi jang sudah tentu berbeda daripada kenjataan³ jang sesungguhnja berlaku dalam praktek. Menurut kenjataannja, harga beras di Djawa Tengah dan Djawa Timur telah mentjapai tingkat ke-gila²an jang belum pernah

kita alami dalam zaman kemerdekaan ini, termasuk zaman Revolusi 1945-1948 jang keadaannja sebetulnja djauh lebih sulit daripada keadaan sekarang ini.

Menurut laporan² dari daerah², maka harga beras dibeberapa tempat, misalnja Malang, Surabaja, Semarang, Magelang, Djokjakarta, dan lain² sudah bergerak antara Rp. 175,— sampai Rp. 200,— setiap kilogram, dan disamping itu beberapa daerah pedesaan jang biasanja terkenal sebagai daerah „surplus" tidak luput pula dari bahaja penjakit busunglapar atau bahaja kekurangan makan, sehingga Komando Aksi Anti-lapar Djateng telah terpaksa menggerakkan usaha² praktis guna membantu meringankan penderitaan Rakjat dibeberapa tempat.

Sementara itu dibeberapa daerah, telah diusahakan djuga untuk mendjual gaplek dengan harga jang lebih rendah daripada harga umum sebanjak beberapa puluh ton dari Wonogiri dan Bojolali, sedangkan Pemerintah Pusat telah menjatakan kesanggupannja untuk mengirim 40.000 ton beras.

Dalam hal „perlombaan" menderita kekurangan bahan² makanan chususnja beras rupanja Djawa Barat djuga tida mau „ketinggalan", dan terutama daerah Kuningan dan Indramaju dimana penduduk dari banjak desa sudah menundjukkan gedjala² penjakit „hongeroedeem".

Kaum tani, terutama buruhtani dan tanimiskin, sangat menderita akibat penjelewengan Peraturan² 26 Mei. Disatu fihak daja beli mereka telah sangat merosot, akibat kenaikan harga barang² kebutuhan mereka, dipihak lain harga hasil² pertanian dan ternak merosot karena kesulitan² pengangkutan dan ongkos² pengangkutan jang naik setjara gila. Barang² kebutuhan kaum tani jang sangat naik harganja, bukan sadja tekstil, gula pasir, minjak tanah, minjak kelapa, sabun, akan tetapi djuga alat² pertanian dan pupuk. Pupuk ZA misalnja jang harga resminja Rp. 3,75 naik mendjadi Rp. 20,10 dan pupuk urea dari Rp. 7,50 naik mendjadi Rp. 25,— setiap kilogramnja.

Betapa merosotnja daja-beli Rakjat pekerdja, karena sangat naiknja ongkos-hidup, dapat antara lain dibuktikan bahwa masih banjak upah daripada pekerdja harian Pemerintah pada umumnja sekarang berdjumlah hanja Rp. 25,— sehari, sedangkan dibanjak tempat mereka belum djuga mendapat pembagian beras setjara teratur dan kontinu.

Telah kita ketahui semua, bahwa dengan Rp. 25,— itu hanja tjukup untuk membeli 1 gelas strup es.

Nasib kaum intelektuil pekerdja djuga tidak luput dari serangan² teror Peraturan² 26 Mei. Hampir semua golongan inteligensia

pekerdja sudah tidak sanggup lagi hidup se-mata² dari gadjinja jang diterima dari satu sumber sadja.

Untuk menutup kekurangan anggaran beaja rumah tangganja, mereka pada umumnja berusaha mendapatkan sumber² penghasilan lain, dan ini sudah tentu sangat mengurangi prestasi mereka di-tempat² pekerdjaan mereka jang pokok.

Bukan sadja Rakjat pekerdja kaum buruh, tani, nelajan, pekerdja² keradjinan tangan dan kaum inteligensia jang mengalami penderitaan hebat akan tetapi djuga kaum pengusaha industri sedang dan ketjil, terutama pengusaha² industri chususnja industri tenun. Dalam banjak surat²kabar² belum lama berselang tersiar kabar, bahwa kaum pengusaha tenun di-daerah² Klaten misalnja, men-djerit², karena Peraturan² 26 Mei telah „memotong" modal kerdja mereka dengan tidak kurang dari 80-85%, sehingga likwiditet mereka tinggal tidak lebih dari 15%. Ini adalah pengusaha² jang tergabung dalam „koperasi²" jang biasanja mendapat pembagian bahan² baku dan benang-tenun dari Pemerintah, sedangkan pengusaha² tenun sedang dan ketjil jang biasanja terpaksa berusaha sendiri untuk mendapatkan bahan² baku dan benang-tenun dari pasaran bebas pada umumnja telah gulung tikar atau menghadapi kebangkrutan.

Dan menurut perkembangan jang terachir, maka 75% dari **industri ketjil** dewasa ini sudah tidak bekerdja lagi, karena mendjerit kesulitan² mendapatkan bahan² baku, dan apabila bahan² baku ini ada, maka tidak terbeli lagi. Ini adalah akibat Peraturan² 26 Mei jang memberikan kesempatan se-bebas²nja kepada tukang² tjatut besar, untuk memborong bahan² itu dengan tudjuan mendjualnja lagi dengan harga jang lebih tinggi.

Koperasi² konsumsi baik koperasi pegawai negeri maupun koperasi² rukun kampung atau koperasi desa sebagian besar terpaksa gulungtikar karena tidak dapat menebus barang²nja dari PDN² dan karena kesulitan² pengangkutan.

Angka² lengkap tentang produksi perkebunan selama 6 bulan terachir ini, belum tersedia untuk dibandingkan dengan angka² produksi selama pertengahan pertama tahun 1963. Akan tetapi dari fakta² jang sudah kita peroleh, mengenai akibat² Peraturan² 26 Mei dibidang perkebunan sudah dapat memberikan gambaran² djelas, bahwa Peraturan² 26 Mei sangat memerosotkan produksi perkebunan baik swasta maupun Pemerintah. Pimpinan perkebunan swasta di Djawa Barat misalnja akan terpaksa mengurangi atau menghentikan samasekali kegiatannja, karena mereka tidak sanggup lagi memberikan tjatu beras kepada 500.000 kaum buruh-

nja sebanjak tidak kurang dari 25.000 ton setiap bulan dengan harga Rp. 160,— setiap kg.

Dibidang pertambangan telah kita lihat kenjataan, bahwa ongkos produksi TABA, misalnja meningkat dari Rp. 103,5 djuta mendjadi tiga kali lipat jaitu lebih kurang Rp. 310,— djuta, menurut keterangan Ketua SBTI, pada tanggal 26 Djuni 1963 didepan Sidang PB FN.

Achirnja, tidaklah perlu diterangkan lagi, bahwa pengeluaran Pemerintah Pusat maupun Daerah, dengan adanja Peraturan² 26 Mei itu, setjara umum sangat meningkat. Beberapa minggu jang lalu Pemerintah telah terpaksa mengambil keputusan untuk memberikan kredit tambahan sebanjak Rp. 9,8 miljard kepada PDN² untuk memperkuat likwiditet PDN² itu.

Demikianlah gambaran ringkas tentang praktek² daripada Peraturan² Ekonomi 26 Mei dibeberapa bidang kehidupan ekonomi dengan bukti² jang hidup bahwa Peraturan² itu bukan sadja tidak berhasil mentjapai maksud jang direntjanakan, akan tetapi sebaliknja telah membikin lebih rusak dan lebih parah lagi situasi ekonomi pada umumnja dan situasi moneter chususnja, serta lebih memberatkan beban penghidupan Rakjat pekerdja, terutama kaum buruh dan kaum tani.

Pemerintah dalam keterangannja didepan Sidang Pleno DPR-GR pada tanggal 12 Desember 1963 jang lalu telah menjatakan pengakuannja dengan terus terang bahwa Peraturan² 26 Mei telah menga lami kegagalan dengan mengemukakan pula sebab² kegagalan itu jaitu karena **„terlalu banjak mengharapkan bantuan beratus-ratus djuta dolar dari luarnegeri".**

Ini adalah salahsatu sebab kegagalan. Sebab² jang lain adalah karena konseptor² Peraturan² 26 Mei dengan tidak tahu malu telah melanggar dan meng-indjak² Gesuri dan Dekon, meninggalkan prinsip musjawarah dan mufakat dan tetap berpegang kepada teori² ekonomi liberal, teori ekonomi neo-kolonial jang sudah lama ditjekokkan oleh kaum imperialis kepada „ahli²" ekonomi soska dan Masjumi, teori ekonomi jang reaksioner dan bertentangan samasekali dengan Manipol dan Dekon, bertentangan sepenuhnja dengan patriotisme ekonomi.

II

MEMENANGKAN KONFRONTASI EKONOMI TERHADAP „MALAYSIA"

Projek neo-kolonial „Malaysia", sebagai suatu manifestasi imperialisme Inggris jang mendapat sokongan penuh dari imperialisme

Amerika Serikat bertudjuan untuk mengepung dan menghantjurkan samasekali hasil² Revolusi Agustus 1945.

Dibidang ekonomi „Malaysia" akan memaksakan Indonesia supaja melepaskan politik perdagangan luarnegerinja, melepaskan pembangunan berentjana, jang dalam batas² tertentu merugikan kaum imperialis dan dengan begitu mempertahankan ketergantungan ekonomi Indonesia kepada „Malaysia". Makaitu sikap Indonesia untuk memutuskan hubungan ekonominja dengan „Malaysia" sebagaimana jang digariskan oleh Presiden Sukarno adalah suatu sikap jang tepat dan tegas. Sikap ini sesuai dengan tuntutan Rakjat dari semua golongan dan lapisan jang berdjuang, sesuai dengan tuntutan PKI jang telah dikemukakan oleh Kawan Njoto dalam sidang PB FN pada achir bulan September 1963 jang lalu, bahwa konfrontasi kita terhadap „Malaysia", adalah konfrontasi total, — politik, ekonomi, militer dan kebudajaan.

Konfrontasi kita dibidang ekonomi seharusnja berkembang kearah dua djurusan :

(a) pukulan² jang langsung kepada „Malaysia" berupa pemutusan hubungan ekonomi seperti jang telah didjalankan sekarang, dan mengambil tindakan² terhadap perusahaan² kaum imperialis Inggris dan perusahaan² kaum imperialis lainnja jang menjokong „Malaysia" terutama AS ;

(b) bersamaan dengan itu mengambil tindakan tegas menanggulangi soal ekonomi, tindakan² jang kongkrit untuk memperbaiki penghidupan Rakjat, dan tindakan² lainnja jang dapat membangkitkan kegembiraan serta keuletan kerdja Rakjat.

Dalam pada itu, perdjuangan mengganjang „Malaysia" dibidang ekonomi harus pula sedjauh mungkin meletakkan dasar untuk membangun ekonomi Indonesia jang tidak tergantung, ekonomi jang merdeka penuh, bebas daripada sisa² imperialisme dan sisa² feodalisme seperti dinjatakan dalam Dekon. Djadi harus diberantas usaha² dari sementara golongan jang ingin menggerowoti tindakan² konfrontasi itu dengan disatu fihak bersikap pasif terhadap pemutusan hubungan ekonomi dengan „Malaysia", dan difihak lain berusaha memindahkan ketergantungan Indonesia dari „Malaysia" (cq Singapura, Penang dan Malaya) kepada Hongkong dan negara² imperialis lainnja, setjara langsung atau tidak langsung.

Singapura, Penang dan Malaya mempunjai peranan jang sangat penting sebagai pusat² perdagangan barang² export Indonesia. Barang² export ini, terutama karet, minjak hasil maskapai² asing, kopra, lada, timah dan minjak sawit di-reexport ke Amerika Serikat, Inggris dan negara² Eropa lainnja.

Menurut tjatatan² resmi, maka djumlah nilai export Indonesia ke Singapura, Penang dan Malaya dalam tahun 1961 tidak kurang dari AS $ 215,8 djuta atau Rp. 9.810,— djuta dan merupakan 27,3% dari nilai seluruh export Indonesia.

Dari djumlah ini, nilai export karet ke Singapura dan Penang meliputi Rp. 3.770,— djuta atau hampir 40%, timah Rp. 800,— djuta atau 8,15% dan kopra Rp. 780,— djuta atau hampir 8% dari seluruh nilai export Indonesia ke Singapura, Penang dan Malaya.

Seperti akan diuraikan lebih landjut, maka perdagangan transito dengan Singapura sebagai pusatnja jang diperlengkapi dengan pelabuhan bebas dan matjam² variasinja lagi adalah indentik dengan penjelundupan. Menurut angka² jang dapat dikumpulkan dan jang kebenarannja tidak perlu diragukan, maka djumlah karet jang diselundupkan ke Singapura dari tahun 1954 sampai tahun 1960 sadja tidak kurang dari 1.050.000 ton atau rata² lebih kurang 150.000 ton setahun, sedangkan djumlah kopra jang diselundupkan setiap tahunnja, — buat sebagian besar ke Singapura, — lebih kurang 100.000 ton.

Sikap tegas dari Pemerintah jang telah digariskan oleh Presiden Sukarno untuk memutuskan hubungan ekonomi dengan „Malaysia", ternjata telah membawa akibat² jang sangat berat bagi „Malaysia". Dalam tempo 3 bulan sadja, menurut keterangan resmi dari apa jang menamakan diri „Menteri Perdagangan Dan Industri Singapura" telah menderita kerugian tidak kurang dari Str. $ 327 djuta atau AS $ 109 djuta. Dan bukan sadja pengusaha² besar di Singapura telah mulai me-rengek² agar konfrontasi Indonesia dibidang ekonomi dihentikan, akan tetapi „Menteri Perdagangan Dan Industri Malaysia", Lim Swee Aun, menurut berita dalam harian „Ekonomi Nasional" tanggal 4 November 1963 jang lalu, telah menjatakan, bahwa „Pemerintah 'Malaysia' tidak akan sampai kepada penjelesaian politiknja dengan fihak Indonesia, apabila konfrontasi ekonomi Indonesia terhadap 'Malaysia' tetap dilakukan". Dan tidak kurang dari kepala-boneka si Tengku sendiri jang pernah mengatakan bahwa „konfrontasi Indonesia benar² akan mentjekik lehernja 'Malaysia', ketjuali katanja, apabila bangsa² 'Malaysia' dengan segala djalan berusaha untuk menarik sekutu²nja (kaum imperialis Inggris dan Amerika) kedalam satu front jang bulat menghadapi Indonesia".

Meskipun begitu, adalah keliru sekali untuk memperketjil kekuatan musuh, lebih² djika kita ketahui bahwa jang pegang peranan pokok dibelakang pembentukan negara neo-kolonial „Malaysia" adalah kaum imperialis Inggris jang disokong oleh kaum imperialis

Amerika Serikat dan kaum reaksioner di-negara² lain, seperti Djepang, Djerman Barat dan lain² dan kaum kontra-revolusi di Indonesia, kakitangan kaum imperialis.

Untuk mengkonsolidasi dan mengembangkan tindakan² konfrontasi ekonomi terhadap „Malaysia" lebih landjut, harus diambil langkah² kongkrit dan berentjana, bukan sadja dibidang teknis-ekonomis akan tetapi djuga dibidang keamanan dan aparatur, sebagaimana setjara pokok telah dikemukakan oleh Wakil² CC Partai didepan Sidang PB FN pada achir bulan September 1963 jang lalu. Dibidang keamanan, ketjuali harus didjamin adanja pendjagaan keras dan tegas terhadap lalulintas dilaut antara RI dengan „Malaysia", djuga harus segera diambil tindakan untuk mensita semua modal jang sebetulnja dimiliki oleh pengusaha² Singapura, akan tetapi, jang dengan menggunakan orang² Indonesia sebagai „stromannen" antara lain diinvestasi dibidang perusahaan remilling di Sumatra Selatan. Sebaliknja harus djuga diperiksa lebih djauh, sampai dimana kebenaran berita² bahwa banjak pemilik² perusahaan² remilling di Indonesia jang menanam modalnja di Singapura dibidang perusahaan karet jang berkwalitet tinggi. Tudjuannja adalah untuk mengolah karet Rakjat tidak di Indonesia akan tetapi di Singapura. Remilling²nja di Indonesia hanja dipakai sebagai kedok untuk membeli banjak karet Rakjat berkwalitet rendah, dan meneruskannja ke Singapura. Usaha² dari pengusaha² gadungan dibidang penjelundupan jang sangat merugikan perdjuangan konfrontasi ini, tidak boleh kita perketjil artinja.

Untuk dapat mendjalankan tugas berat dibidang keamanan ini dengan se-baik²nja, maka dibutuhkan alat² negara jang berani bertindak tegas, konsekwen dan berdjiwa Manipolis sedjati. Demikian djuga harus didjamin agar aparatur perekonomian dengan personalianja jang biasanja bertugas mengurusi soal import-export ke Singapura, Penang dan Malaya benar² dapat mendjalankan tugasnja jang sekarang, jaitu setjara konsekwen melakukan konfrontasi terhadap „Malaysia".

Menurut berita² terachir banjak djuga hasil² jang telah tertjapai dibidang pemberantasan lalu-lintas penjelundupan. Selama lebih kurang 3 bulan, telah dapat disergap 4 kapal „Malaysia" dan lebih kurang 50 perahu² penjelundup jang memuat ratusan ton barang² terutama barang² lux.

Dalam hubungan ini kita dapat menjambut keputusan jang baru² ini diambil oleh Gubernur Kepala Daerah Riau tentang prinsip „barter" jang berlaku bagi perdagangan daerah Riau Daratan dengan daerah lain di Indonesia, ataupun dengan luarnegeri, dengan pengertian bahwa harus ada djaminan sepenuhnja bahwa tidak

akan dilakukan perdagangan „barter" gelap dengan luarnegeri, chususnja dengan „Malaysia".

Djalan jang tepat untuk membebaskan Indonesia dari ketergantungannja kepada Singapura, Penang dan Malaya jalah seharusnja dengan memindahkan pasaran bahan² export kita langsung ke Indonesia, dan bukan memindahkannja ke-negeri² lain.

Akan tetapi memindahkan pasaran ke Indonesia se-kali² tidak boleh diartikan memindahkan **peranan** Singapura-Malaya sebagai pusat perdagangan transito ke Indonesia, misalnja dengan mentjiptakan pelabuhan bebas, free trade zones dan bonded warehouse, sebab :

a. Barang² export jang diperdagangkan dan mendjadi problim Indonesia adalah barang² jang dikuasai oleh Indonesia. Sekalipun untuk sementara ada kesulitan dalam putusnja hubungan dengan Singapura-Malaya tetapi perspektifnja baik sekali djika tindakan² selandjutnja tepat. Bagi Singapura-Malaya merupakan satu kesulitan jang sangat lama dan berat karena mereka tidak mendapat barang² lagi dari Indonesia setjara langsung.

b. Pelabuhan bebas dengan segala variasinja adalah pertanda daripada kelemahan ekonomi negara² jang bersangkutan jang hanja hidup dari pelajanan², jaitu melajani barang² kaum kapitalis monopoli jang menghadapi kesulitan pasar. Untuk menarik kapitalis² asing diadakan pelajanan² setjara istimewa dan menjeluruh, seperti fasilitet pelabuhan, bank services, night-clubs dan akibatnja jalah meradjalelanja **penjelundupan, gangster dan banditisme, pelatjuran, mata² dan gerakan subversi asing.**

c. Karena pelabuhan bebas dengan segala variasinja itu, dalam prinsipnja adalah berdasarkan services, maka akan ada industri ringan, pengepakan (packing), pembotolan (bottling), penjisihan (sortering) dan peningkatan mutu (up-grading) jang terutama akan dimiliki oleh kapitalis² monopoli asing. Suatu golongan pengusaha² besar Indonesia tertentu berilusi untuk memperkuat kedudukan kapitalis² nasional kita didaerah pelabuhan bebas. Tetapi tanpa mendjadi komprador atau kapitalis birokrat tidak mungkin. Perlu diketahui bahwa diantara pembela² pelabuhan bebas adalah djuga banjak elemen² kapitalis birokrat. Untuk keperluan pembangunan, pelabuhan bebas tidak dapat menjediakan barang² modal jang kita perlukan tanpa menggunakan pedagang² pelabuhan bebas, maka dengan begitu kita setjara sukarela membuang ongkos untuk biaja perantara² dipelabuhan bebas jang mestinja tidak perlu. Golongan pengusaha besar tersebut akan memasukkan sebagai bank service

utama dalam pelabuhan bebas nanti, jalah Bank Pembangunan Swasta.

d. Singapura-Hongkong sebagai pusat perdagangan transito dan pelabuhan bebas sebenarnja mempunjai sandaran negara² jang mengkonsumsi barang² hasil industri negara² imperialis seperti Inggris, Amerika Serikat dan achir² ini barang² Djepang. Imperialis Inggris menggunakan Singapura sebagai pusat pemasaran barang²nja untuk negara² tetangganja jaitu Birma, Malaya, Indonesia, Muang Thai dan lain². Hongkong dimaksudkan sebelum berdirinja RRT untuk melajani Tiongkok, tetapi sekarang malahan sebagian, sekalipun terbatas, barang² RRT masuk kepasar Hongkong. Sehingga Hongkong sekarang lebih banjak menjandarkan diri pada Filipina dan Indonesia, sebagai negeri² konsumen.

e. Bagi Indonesia adalah tidak logis untuk mendirikan pelabuhan bebas untuk melajani Indonesia sendiri dengan menjediakan sebagian areal pelabuhannja guna memanggil kapitalis monopoli asing mengadakan kegiatan² ekonomi dan subversi serta bermain² di-pelabuhan² Indonesia. Dan barang² jang akan diperdagangkan adalah barang² djadi jang mewah. Untuk barang² export kita adalah lebih baik mendirikan **trade centres** dengan menjediakan fasilitet² jang tjukup dimana pembeli² luarnegeri dapat dengan mudah berbelandja di Indonesia. Atau kita mengadakan **hubungan langsung** dengan negara² the new emerging forces atas dasar saling menguntungkan.

f. Negara jang berdaulat, jang mempunjai sumber² ekonomi jang luas dan kaja raja dengan Rakjatnja 100 djuta lebih seperti Indonesia, dan jang mempunjai kemampuan jang tjukup untuk hidup dari produksinja, dari perkembangan ekonominja sendiri, tidak seharusnja mengembangkan aktivitet ekonominja dari pelajanan² kepada kaum kapitalis monopoli asing.

g. Pelabuhan bebas dengan segala matjam variasinja adalah bertentangan dengan Haluan Negara dan pedoman² pelaksanaannja, bertentangan dengan ekonomi terpimpin menurut Manipol, Deklarasi Ekonomi dan Ketetapan² serta Resolusi² MPRS, jang menolak liberalisasi ekonomi.

III

LAKSANAKAN GARIS MANIPOL DIBIDANG PERDAGANGAN LUAR DAN DALAMNEGERI

Karena pada pokoknja ekonomi Indonesia masih mendasarkan aktivitetnja pada bidang perdagangan luarnegeri dengan menggantungkan diri pada pasaran negeri² imperialis, maka sisa² imperialisme dibidang ini mempunjai pengaruh jang langsung dan menentukan bagi perkembangan perekonomian dan keuangan kita. Hal sematjam ini bukan sadja berlaku bagi Indonesia akan tetapi pada umumnja djuga berlaku bagi semua negara² Asia-Afrika-Amerika Latin jang baru berkembang dan belum dapat membebaskan diri dari ketergantungannja kepada ekonomi imperialis.

„Negara² Barat merampok negara² Asia-Afrika", demikianlah keterangan seorang pedjabat organisasi Asia-Afrika dalam konferensi persnja di Kairo pada tanggal 2 Desember 1963 jang lalu. **„Penurunan harga export bahan² mentah ke-negara² Barat dan kenaikan harga import barang² industri dari negara² itu, telah menimbulkan kerugian amat besar bagi negara² jang sedang berkembang. Harga bahan² mentah merosot dengan 27,9%, sedangkan barang² industri jang diimport dari negara² Barat meningkat dengan 8%"**, demikian diterangkannja lebih landjut.

Sudah kita ketahui, bahwa karet merupakan bahan export Indonesia jang terpenting dan merupakan lebih kurang 60% dari seluruh harga export, tidak termasuk minjaktanah dan hasil²nja. Pernah kita mengalami „zaman keemasan" dimana baik volume maupun harga karet mentjapai puntjaknja, jaitu dalam tahun 1951 : export karet berdjumlah 750.000 ton dengan harga 59,07 sen dolar setiap pon atau 118,14 sen dolar AS setiap kg. Djadi nilai export karet kita pada waktu itu jalah : 750.000.000 × 118,14 sen dolar = AS $ 886,05 djuta. Ini adalah suatu djumlah jang djauh lebih besar dari seluruh nilai export kita dalam tahun 1962 sebesar AS $ 465,77 djuta, tidak termasuk nilai export minjaktanah.

Akan tetapi kaum imperialis internasional dengan Amerika Serikat sebagai kepalanja, tidak sebegitu bodoh untuk membiarkan „zaman keemasan" di Indonesia itu berlangsung lebih lama, meskipun „zaman keemasan" itu ditandai oleh menggelombangnja kekuasaan reaksioner Kabinet Sukiman jang sangat terkutuk dengan MSA dan razia-Agustusnja itu. Sebab baru dua tahun kemudian jaitu pada tahun 1953, volume export karet telah merosot mendjadi lebih kurang 710.000 ton dengan harga rata² 24,23 sen

dolar setiap ponnja. Djadi dalam tempo 2 tahun sadja nilai export karet kita sudah turun dengan $ 542 djuta, jaitu dari $886,05 mendjadi $ 344,06 djuta (= 710.000.000 × 2 × 24,23 sen dolar). Ini adalah salahsatu tjontoh jang sangat kongkrit, gamblang dan djelas dari pengalaman kita dulu 10 tahun jang lalu mengenai praktek² djahat dari kaum monopolis internasional dibidang export karet.

Nilai jang terendah daripada export karet dalam tahun 1953 jaitu tahun resesi Amerika Serikat, kini kita djumpai kembali jaitu $ 305,33 djuta dalam tahun 1961 dan $ 298,53 djuta dalam tahun 1962.

Angka² lengkap untuk tahun 1963 belum tersedia, akan tetapi menurut tjatatan² harga² internasional, harga karet dalam bulan Agustus tahun 1963 jang lalu telah meluntjur kebawah dengan tjepatnja jaitu sampai 23 sen dolar AS, sedangkan harga dalam bulan Djuli tahun 1960 masih tertjatat 45 sen dolar setiap pon.

Kalau kita ambil gambaran sebagai keseluruhan, maka nilai export Indonesia dalam tahun 1962, telah merosot dengan lebih kurang $ 67 djuta, dibandingkan dengan tahun 1961, jaitu dari $ 532,7 mendjadi $ 465,7 djuta, tidak termasuk nilai export minjak tanah dengan hasil²nja. Turunnja nilai export ini disebabkan terutama karena turunnja nilai export bahan² penting kita seperti karet, kopra, kopi, teh, tembakau dan kelapasawit (dari angka² BPS jang diumumkan pada tanggal 21 Mei dalam suratkabar² di Djakarta).

Di-tiap² negara jang baru berkembang dan ekonomis masih sangat tergantung pada dominasi kapitalisme monopoli internasional, maka sudah mendjadi hukum, bahwa perkembangan export selalu mentjerminkan perkembangan import. Kalau kita memeriksa angka² terachir mengenai perkembangan import kita, maka ternjata, bahwa import selama pertengahan pertama tahun 1963 djauh lebih merosot dibandingkan dengan angka² selama periode jang sama dalam tahun 1962, dan merosotnja memang tidak tanggung² jaitu dari Rp. 15,134 miljard mendjadi Rp. 9,766 miljard, atau dihitung dalam AS $ berdasarkan kurs 1 $ = Rp. 45,— dari $ 336,31 djuta mendjadi $ 217,02 djuta. Djadi dalam satu tahun merosot dengan Rp. 5,368 miljard atau sama dengan $ 119,29 djuta.

Diantara golongan² barang² import jang nilainja mendjadi berkurang selama periode jang sama jalah golongan² barang² esensiil, jaitu nilai import barang² baku dan penolong, barang² modal dan spare-parts, jang berkurang dengan Rp. 3.378 miljard atau sama dengan $ 75,07 djuta.

Gambaran tentang perkembangan import itu memang belum mentjerminkan sepenuhnja keadaan seluruh tahun 1963 dibandingkan dengan keadaan seluruh tahun 1962, akan tetapi sudah tjukup memberikan kejakinan kepada kita betapa sulitnja dan seretnja proses perkembangan produksi dalamnegeri jang masih sangat tergantung pada import barang² baku, penolong, spare-parts dan barang² modal dari luarnegeri, lebih² djika kita ketahui, bahwa persediaan devisen untuk barang² tersebut dalam tahun 1962 sudah berkurang mendjadi 20-25% dari djumlah jang dibutuhkan dalam keadaan „normal".

Sangat berkurangnja import barang² esensiil itu ditambah lagi dengan ber-bagai² matjam faktor² penghalang dalamnegeri, seperti korupsi, birokrasi, tidak atau kurang teguhnja dilaksanakan garis² Manipol dibidang produksi, misalnja kurangnja usaha² untuk mengembangkan tenaga² produktif Rakjat pekerdja, sudah tentu membawa akibat sangat merosotnja produksi dalamnegeri. Dan djika hal ini terdjadi seperti sekarang ini, dalam keadaan terdjadinja pengeluaran² keuangan negara jang kurang produktif, maka sudah pasti menimbulkan akibat² jang sangat mendalam atas seluruh perkembangan ekonomi nasional kita. **Djelaslah, kematjetan dibanjak sektor produksi dan distribusi, dalam keadaan terdjadinja pengeluaran² negara jang tidak seimbang dengan kemampuan riil daripada aparat produksi ditambah lagi dengan pentjolengan² oleh kaum kapitalis birokrat, gerakan subversi dan musuh lainnja dibidang ekonomi telah membawa akibat menghebatnja inflasi terbuka, dan dengan begitu sangat merosotnja daja-beli Rakjat pekerdja, baik sebagai produsen, maupun sebagai konsumen. Dan apa jang dinamakan „disparitet", jaitu perbedaan antara kurs resmi dan kurs riil, antara harga resmi dengan harga spekulatif, adalah se-mata² suatu akibat daripada suatu proses ekonomi jang bersumber pada faktor² fundamentil luar dan dalamnegeri jang tidak dapat diatasi dengan djalan moneter-teknis jang konvensionil dan tradisionil sadja.**

Djelaslah, bahwa konsep politik moneter kaum kapitalis monopoli jang disalurkan lewat IMF (International Monetary Fund) atau DMI (Dana Moneter Internasional) jang pada pokoknja menuntut tindakan² devaluasi dan liberalisasi harga, tidak mungkin dan tidak akan mungkin memberikan djalan keluar jang definitif, djuga apabila politik itu didukung oleh „bantuan" luarnegeri dari AS jang beratus-ratus djuta dolar djumlahnja. Ini dibuktikan oleh pengalaman² kita sendiri, oleh pengalaman dari berbagai negara tergantung di Asia-Afrika-Amerika Latin jang sangat tragis tentang terus merosotnja keadaan perekonomian mereka meskipun

sudah menerima „bantuan" ratusan djuta dolar dari IMF, IBRD (International Bank For Reconstruction And Development) dan US EXIM BANK.

Dengan begitu mendjadi djelas djuga, bahwa mengubah Peraturan² 26 Mei **hanja** dengan memindah-mindahkan barang² dari golongan jang satu kegolongan jang lain tidaklah akan mendatangkan perbaikan² jang berarti, dan sebaliknja malahan bisa menimbulkan kesulitan² baru jang tidak mudah diatasi.

Djalan satu²nja untuk mengikis habis sisa² imperialisme dibidang perdagangan luarnegeri adalah mengubah setjara prinsipiil praktek² politik perdagangan luarnegeri sekarang ini, dan dengan konsekwen mengikuti garis jang telah ditetapkan oleh Presiden Sukarno dalam MANIPOL dan pedoman² pelaksanaannja, antara lain APP (Amanat Presiden tentang Pembangunan) jaitu memperluas perdagangan luarnegeri RI dengan negara² NEFO, chususnja dengan negara Asia-Afrika dan Amerika Latin atas dasar saling menguntungkan.

Dan untuk dapat merealisasi setjara konsekwen garis Manipol dibidang perdagangan luarnegeri, maka adalah sjarat mutlak untuk meninggalkan buat se-lama²nja politik liberalisasi dibidang export-import dengan mengadakan export-import planning jang berentjana sebagai bagian daripada seluruh pembangunan ekonomi nasional berentjana.

Dan djika Presiden Sukarno sudah menginstruksikan untuk menjingkirkan oknum² anti-Manipol dibidang kehakiman, maka sangat diharapkan agar Presiden djuga memerintahkan rituling organisasi dan personalia dengan menjingkirkan elemen² jang busuk dan reaksioner, terutama elemen² PSI-Masjumi dengan badju baru, dari seluruh aparatur perekonomian dan keuangan, cq aparatur **export-import** dan perdagangan dalamnegeri.

Jang perlu mendapat perhatian segera, adalah tindakan² dibidang export-import dan dibidang perdagangan dalamnegeri atau bidang distribusi nasional sebagai berikut :

Export-import

a. Export barang² penting, jaitu barang² produksi keras dikuasai dan diselenggarakan oleh Pemerintah. Disamping barang² keras ada pula barang² lemah jang kini dikuasai oleh negara jang dengan sendirinja tetap diselenggarakan oleh Pemerintah.
b. Dengan PDN jang telah diretul seefektif mungkin maka Pemerintah membeli barang² export penting langsung dari produsen dengan harga : **Ongkos produksi ditambah keuntungan**

produsen. Tjabang² PDN jang ditundjuk untuk itu melakukan perdagangan pengumpulan dan mengurus kelantjaran pengangkutan ke-pelabuhan² export.

c. Dalam rangka memenangkan konfrontasi ekonomi terhadap „Malaysia" maka pasaran barang² export harus dapat dipindahkan di Indonesia. Untuk itu harus diutamakan melajani pembeli² luarnegeri jang langsung mengambil barang² export kita di Indonesia, baik melalui persetudjuan² dagang bilateral maupun jang bersifat pembelian² bebas. Harus dibentuk **trade centres** disekitar pelabuhan² besar dengan fasilitet² jang tjukup dan efisien untuk melajani lalulintas pelajaran jang meningkat.

d. Dalam penjederhanaan pungutan² atas import dan meringankan beban bagi konsumen dan produsen maka semua **pungutan sedjenis HPN dihapuskan** dan hanja diadakan pungutan berupa bea masuk. Barang² golongan I sekarang ditambah dengan benang tenun dan tekstil kasar dan untuk ini berlaku perhitungan kurs dasar 1 $ = Rp. 45,— serta dikenakan bea-masuk sebesar 50% harga c.i.f.

e. Barang² golongan II dikenakan bea masuk sebesar 100% dari harga c.i.f. berdasarkan kurs dasar 1 $ = Rp. 45,— Termasuk dalam barang² golongan II adalah bahan² baku dan penolong, spare-parts, bahan² bangunan, barang² modal berupa mesin², truk², bus⁶ dan sebagainja.

f. Barang² golongan III dikenakan bea masuk 30 kali c.i.f. berdasarkan kurs dasar 1 $ = Rp. 45,— Barang ini terdiri dari barang² mewah. Penggolongan barang² golongan III jang ada sekarang perlu ditindjau kembali karena masih banjak diantaranja terdapat barang² jang mestinja tidak tergolong barang² mewah misalnja paku dan lainnja.

g. Import barang² penting jang sekarang sudah dikuasai oleh Pemerintah tetap dikuasai dan diselenggarakan oleh Pemerintah dengan menggunakan PDN² jang telah diritul sebagai aparat jang efektif dalam penjaluran barang² dan pelaksanaan import. Barang² import untuk keperluan sektor² negara semuanja disalurkan oleh PDN² jang telah diritul tanpa menggunakan perantara² lain. Pemerintah mengutamakan import barang² modal, bahan² baku dan penolong jang dapat mendorong peningkatan produksi dalamnegeri terutama pertanian, perkebunan dan pertambangan dan mendorong perkembangan industri.

Aparat² Distribusi Negara

a. Untuk mengkordinir export-import dan menjesuaikan dengan kebutuhan pembangunan berentjana dibentuk **Dewan Export-Import** jang komposisinja mentjerminkan kegotongrojongan nasional poros Nasakom. Ia merupakan aparat Kabinet. PDN² melaksanakan kebidjaksanaan jang ditetapkan oleh Dewan Export-Import jang tidak boleh bertentangan, tetapi harus sesuai dengan kebidjaksanaan djangka pendek jang ditempuh oleh Kabinet berdasarkan Deklarasi Ekonomi.

b. Untuk mengkordinir peredaran barang² perdagangan didalamnegeri perlu dibentuk **Dewan Distribusi Nasional** jang komposisinja mentjerminkan kegotongrojongan nasional poros Nasakom. Alokasi barang² ke-daerah² serta ke-sektor² tertentu setjara berentjana ditugaskan kepada Dewan tersebut dengan berpegangan pada prinsip penjaluran jang tjepat, aman dan murah. Semua alokasi diumumkan setjara terbuka.

Tentang harga dan tarif

a. Setelah diadakan rituling aparatur setjara integral maka sebagai langkah pertama perlu diadakan tindakan² penurunan tarif setjara efektif. Menurunkan kembali ongkos pengangkutan darat, laut dan udara, menurunkan harga barang² konsumsi pokok dengan membatalkan PP 26 Mei No. 20 tahun 1963, dan menjalurkannja melalui distribusi lewat koperasi², RT² dan warung² jang ditundjuk untuk itu. Peraturan Presiden No. 10 tahun 1963 tentang distribusi bahan/barang pokok keperluan hidup bagi pegawai negeri dirobah sehingga ketentuan jang memungkinkan penggantian dengan uang dihapuskan.

b. Pada pokoknja Pemerintah harus tetap memegang teguh kebidjaksanaan untuk melaksanakan garis pengendalian harga dengan menetapkan harga barang² konsumsi, barang² modal, bahan² baku dan penolong :

(a) untuk barang² import harga „landed cost" ditambah dengan ongkos pengangkutan, ongkos administrasi badan² distribusi negara, ditambah dengan keuntungan maksimum 20% dari harga „landed cost",

(b) untuk barang² hasil produksi dalamnegeri harga pendjualan pabrik ditambah dengan keuntungan maksimal 15%, belum termasuk ongkos² transport dan administrasi badan² distribusi negara dan

(c) koperasi², warung² dan RT mendjual barang² kepada konsumen dengan harga jang harus dibajarnja kepada badan² distribusi negara, ditambah dengan ongkos administrasi dan

keuntungan maksimum 10% dan ditambah dengan ongkos transport.

Barang² jang menurut Ketetapan MPRS ditentukan untuk distribusi Rakjat, seperti beras, tekstil, gula, minjaktanah, minjakkelapa, sabun, dan lain² harus tetap disalurkan oleh Pemerintah lewat aparat² distribusi Pemerintah, koperasi², RT² dan warung² dengan tjara terbuka sehinggga memungkinkan kontrol dari bawah dan dari atas.

IV

ATASI KRISIS BERAS

Ber-kali² Presiden Sukarno telah menekankan betapa penting dan vitalnja masalah produksi, masalah „perut negara" dalam semangat dan nada, bahwa produksi menentukan mati atau hidupnja negara, tanpa produksi negara akan gulungtikar.

Seiring dengan djalan pikiran Presiden Sukarno ini, maka telah mendesing suara² dikalangan Rakjat, bahwa produksi bahan makanan, chususnja beras, adalah „perutnja Rakjat", tanpa beras, Rakjat akan kelaparan dan dengan begitu akan terantjam oleh matjam² bahaja phisik dan mental jang dapat membawa maut padanja. Sudah tentu ini tidak berarti bahwa masalah bahan makanan, chususnja beras merupakan satu²nja masalah jang harus mendapat pemetjahannja setjara urgen. Masih banjak lagi masalah lainnja jang tidak kurang pentingnja daripada masalah beras jang harus diselesaikan dalam rangka penjelesaian tuntutan² Revolusi nasional dan demokratis ini.

Krisis beras, terutama dalam keadaan Indonesia disatu fihak sedang melakukan konfrontasi mati²an terhadap neo-kolonialisme „Malaysia" dengan imperialisme Inggris dan Amerika Serikat sebagai dalangnja, dan difihak lain sedang berdjuang mengganjang kesulitan² ekonomi, merupakan suatu masalah jang tidak dapat ditunda² lagi pemetjahannja.

Dekon telah menetapkan, bahwa „Pemerintah harus mempunjai dan menguasai apa jang dinamakan 'iron stock' beras" dan ini pada pokoknja berarti bahwa Pemerintah setiap waktu harus dapat menguasai persediaan beras jang dapat digunakan untuk sedapat mungkin mempertahankan harga beras akibat perdagangan spekulasi.

Tentang masalah pelaksanaan „iron stock" beras ini terdapat dua pendapat : (a) pendapat jang mengatakan bahwa masalah „iron

stock" beras itu harus per-tama² dipetjahkan dengan djalan mengimport beras, dan (b) pendapat jang menitikberatkan pemetjahan itu pada produksi dalamnegeri sendiri.

Terlepas daripada persoalan tentang maksud² tertentu jang mendjadi latarbelakang daripada pendapat pertama itu, maka kita berpendapat, bahwa usaha untuk mendjamin persediaan beras harus berdasarkan prinsip berdiri diatas kaki sendiri, berdasarkan kekuatan Rakjat Indonesia dan kekajaan alam sendiri, jaitu pertanian sebagai sumber daripada semua djenis bahan² makanan, terutama beras. Dan kita samasekali tidak boleh menggantungkan masalah beras kepada luarnegeri.

Kaum sinisi selalu mengedjek dan meremehkan kemungkinan² untuk dapat memproduksi sepenuhnja volume beras jang kita butuhkan. Mereka menjebarkan ratjun berbisa, bahwa target MPRS „terlalu tinggi", „tidak realistis" dan tidak akan mungkin tertjapai.

Kepada kaum sinisi ini kita hanja bisa mendjawab, bahwa target MPRS bukanlah suatu target jang chajal, akan tetapi sebaliknja suatu target jang riil dan dapat diwudjudkan, asalkan dapat dipenuhi sjarat² pelaksanaannja.

Memang, djika kita ikuti garis main komando²an KOGM (Komando Operasi Gerakan Makmur) jang dilaksanakan dengan gerakan SSB dan Padi Sentra dulu jang ternjata telah mendjadi sentrumnja korupsi, birokrasi dan pemborosan karena sudah menghambur²kan ber-miljard² rupiah uang negara dan Rakjat, maka target MPRS tidak akan mungkin tertjapai, karena meradjalelanja salahurus, karena salahduduk dan salahtundjuk dari kaum kapitalis birokrat. Akibat daripada „Tiga Salah" ini, maka telah terdjadi pelanggaran² jang kasar atas prinsip² demokratis jang telah ditetapkan dalam Manipol dan pedoman² pelaksanaannja terutama APP, Resopim dan Tahun Kemenangan. Hal ini antara lain dapat dibuktikan dari fakta² sebagai berikut :

a. Djatah produksi menurut Ketetapan II/1960 MPRS, adalah sebanjak 20,4 djuta ton padi atau 10,2 djuta ton beras untuk tahun 1962, sedangkan kebutuhan untuk tahun itu, termasuk 3% bufferstock ditetapkan 10.000.682 ton beras sehingga menurut rentjana akan terdapat kelebihan 150.000 ton.
b. Target itu akan ditjapai dengan suatu rentjana menaikkan produksi :

    1. Padi Sentra dengan areal seluas 3 djuta ha bertugas menambah hasil produksi sebanjak 1.350.000 ton beras. Djatah areal ini tidak tertjapai seluruhnja, akan tetapi hanja

sebagian sadja seluas 1,7 djuta ha dan areal inipun tidak seluruhnja bisa menggunakan pupuk jang telah direntjanakan, karena pupuk itu tidak sampai pada alamatnja, mendjadi mangsa daripada hama „tikus kaki dua", dan karena pupuk itu belum dikenal oleh kaum tani jang berkepentingan. Dengan begitu, maka Padi Sentra telah gagal dalam mendjalankan tugas melaksanakan target MPRS.

2. Apa jang dinamakan „intensifikasi massal", meliputi 2 djuta ha, mempertinggi hasil produksi dengan 500.000 ton beras; usaha ini sulit dikontrol hasilnja. Hanja dapat dikemukakan disini bahwa sampai permulaan tahun ini, luas tanah jang menggunakan bibit unggul tidak lebih dari 30% dari seluruh tanah tanaman padi seluas 7,3 djuta ha.
3. Saluran detail di Djawa meliputi 17.500 ha, menambah hasil produksi dengan 19.250 ton beras, akan tetapi hasil²nja belum diketahui ketjuali kenjataan bahwa banjak waduk jang matjet, disebabkan karena saluran² sekunder maupun tertiair belum selesai dibangun.
4. Seksi I Djatiluhur meliputi 60.000 ha, menambah hasil produksi dengan 66.000 ton beras, tambahan ini masih tetap dalam rentjana diatas kertas, belum dapat direalisasi, karena saluran induknja belum selesai.
5. Pembukaan sawah kering seluas 500 ha belum dapat memberikan hasil jang direntjanakan sebanjak 250 ton, karena salahurus, malahan projek itu perlu diselamatkan karena sampai permulaan tahun ini mesin combinenja belum djuga muntjul di Kalimantan, masih di Surabaja atau mungkin sedang dalam perdjalanan ke Kalimantan.
6. Intensifikasi padi ladang dan gogo meliputi 1 djuta ha, dengan tambahan hasil produksi 100.000 ton, mengenai hal ini belum ada laporan lengkap.

Djelaslah, bahwa bukan sadja SSB dan Padi Sentra tidak dapat mentjapai target jang telah ditetapkan oleh MPRS, akan tetapi sebetulnja djuga tidak mungkin ditetapkan angka² jang pasti tentang hasil³ jang telah ditjapainja. Dan inilah sebabnja mengapa angka produksi padi tahun 1962 bersimpang-siur : angka dari BPS berbeda dengan angka Departemen Pertanian dan Agraria, dan berbeda lagi dengan angka Departemen Research Nasional. Djadi rupanja bidang pengumpulan angka³ djuga telah dihinggapi oleh salahurus jang berakibat luas, karena bahan² dari BPS djustru sangat dibutuhkan bagi perentjanaan pembangunan nasional.

Orang boleh ber-lomba³ dengan pengumuman angka³ produksi padi untuk tahun 1963, akan tetapi angka³ diatas kertas, apakah

kertas ini dari BPS, dari Departemen Pertanian dan Agraria, dari Departemen Research Nasional atau Departemen lainnja, samasekali tidak dapat menolong krisis beras jang sangat kritik ini.

Lebih³ sesudah berlakunja Peraturan² Ekonomi 26 Mei, ditambah lagi dengan ber-bagai³ matjam faktor lain, seperti hama tikus, musim kemarau jang agak pandjang, maka sudah terang tidaklah mungkin bagi aparatur dan personalia serta organisasi Departemen Pertanian dan Agraria dan Departemen² lain jang bersangkutan, untuk dapat memenuhi tugasnja merealisasi target MPRS tahun 1963 dengan baik dan tepat pada waktunja.

Bahwa target² produksi padi MPRS bukanlah target² jang chajal dan fiktif, dapat dibuktikan antara lain dari perhitungan ilmiah jang telah dibuat oleh lembaga Penelitian Padi Dan Djenis³ Gandum lainnja. Untuk tahun 1963 misalnja diperlukan produksi padi sebanjak 21.401.264 ton, terdiri dari produksi untuk konsumsi 20.117.275 ton, untuk bufferstock 5%, untuk bibit sawah 190.625 ton dan bibit ladang 87.500 ton. Dengan memperhitungkan kemungkinan² timbulnja kerusakan sebanjak 10%, maka diperlukan produksi kotor 10/9 × 21.401.264 = 23.779.183 ton. Berdasarkan penggunaan areal padi sawah seluas 6.100.000 ha dan areal padi ladang seluas 1.400.000 ha, dengan matjam³ kemungkinan kerusakan, penggunaan untuk tanaman tebu, dan lain³ maka dapatlah diperhitungkan, bahwa rentjana produksi MPRS untuk tahun 1963 dapat dipenuhi dengan suatu target rata² 1,6 ton setiap ha ladang dan rata² 41,7 kwintal setiap ha sawah setahun.

Dan kesimpulan ini adalah realistis, asal sadja dapat dipenuhi sjarat² politik, organisasi dan personalia jang mentjerminkan kegotongrojongan nasional Nasakom, tehnik pertanian jang terpimpin dan bersandar kepada dajatjipta kaum tani dengan melaksanakan sungguh² UUPA dan UUPBH dengan mengutamakan kepentingan kaum tani dan dengan memberikan kebebasan³ demokratis kepada kaum tani.

Berhubung dengan kegagalan² jang telah dialami oleh gerakan SSB, Padi Sentra, dan lain², maka Rakjat terutama kaum tani berhak menuntut agar pedjabat² jang bertanggungdjawab mengumumkan setjara terperintji hasil² usaha SSB, Padi Sentra dan lain³ dan menuntut agar mereka jang telah berbuat tjurang, melakukan korupsi, mendjalankan tugasnja tidak sesuai dengan garis³ Manipol, diritul dan didjatuhi hukuman setimpal. Padi Sentra sudah dibubarkan, dan sekarang mendjelma mendjadi Pertani dan Mekatani, jang menurut pengalaman djuga telah meng-hambur²kan banjak devisen, antaralain karena telah banjak traktor² jang telah

didatangkan dari luarnegeri hampir semuanja nongkrong dan mendjadi besi tua.

Krisis beras sekarang ini sudah sangat akut. Dibanjak daerah telah timbul penjakit busunglapar, beberapa djuta manusia di Djawa misalnja telah menundjukkan tanda² terdjangkit oleh bahaja kelaparan, dibanjak tempat orang sudah tidak bisa lagi makan beras, dan terpaksa makan ampas ubi, gaplek dan lain². Krisis beras disebabkan oleh ber-bagai² faktor :

(a) salahurus jang sudah meradjalela dan keterlaluan dalam lingkungan aparatur dan pedjabat jang bertugas melaksanakan target² produksi beras jang ditetapkan oleh MPRS ;
(b) salahurus jang meradjalela dan keterlaluan dalam lingkungan aparatur dan pedjabat² pusat dan daerah jang bertanggungdjawab atas pelaksanaan UUPA dan UUPBH ;
(c) meradjalelanja perdagangan spekulasi, matjetnja aparat distribusi dan gagalnja pembelian padi ;
(d) teror Peraturan² Ekonomi 26 Mei jang berakibat semakin membubungnja harga beras, merosotnja dajabeli Rakjat pekerdja, terutama kaum tani, dan meningkatnja ongkos² produksi bahan² pertanian terutama beras ;
(e) tidak adanja kesedaran dan keinsjafan daripada pedjabat² tinggi jang bertanggungdjawab untuk mempertinggi produksi dan mendjamin persediaan beras berdasarkan prinsip berdiri diatas kaki sendiri dan karena itu lebih banjak bersandar pada import beras jang memang merupakan djalan paling mudah dan enak karena bisa membawa keuntungan bagi diri pribadi ;
(f) gerakan subversi dan sabotase dari kaum reaksioner, bekas² Soska-Masjumi, kaum Manipolis dan Dekonis munafik jang berhasil menjelundup dalam badan² ekonomi dan keuangan negara, dan jang masih dapat bergerak dengan leluasa di-tengah² masjarakat Indonesia ;
(g) penimbunan² beras oleh kaum kapitalis birokrat, tuantanah dan kaum penghisap besar lainnja dikota dan didesa.

Pelaksanaan UUPA dan UUPBH jang dalam batas² tertentu dapat mendorong perkembangan tenaga produktif kaum tani, dan karena itu bisa memberikan sumbangan besar bagi usaha Pemerintah untuk memperbesar produksi bahan² makanan, chususnja beras, ternjata matjet samasekali.

Menurut keterangan Drs. S. Kasidi jang dimuat dalam **Suluh Indonesia** tanggal 21 Mei 1963 luas tanah seluruhnja jang sudah dan akan di-bagi²kan kepada kaum tani adalah 713.472 ha, terdiri dari tanah kelebihan dari batas maksimum seluas 425.654 ha, tanah

bekas swapradja 71.000 ha, tanah jang langsung dikuasai oleh negara 189.000 ha dan tanah guntai 27.818 ha. Menurut Laporan Menteri Sadjarwo SH kepada Sidang Panitya Landreform Pusat pada tanggal 18 September 1961 luas tanah jang dapat di-bagi²kan kepada kaum tani seluruhnja adalah 1 djuta ha, sedangkan menurut keterangan MP Ir. H. Djuanda almarhum didepan sidang DPR-GR tanggal 5 Djuli 1962, luas tanah² kelebihan dari batas maksimum adalah 401.386 ha, terdiri dari sawah 159.883 ha, dan tanah kering, termasuk tambak, 241.503 ha.

Menurut keterangan terachir, maka meskipun belum dapat dipastikan kebenarannja berhubung dengan simpangsiurnja angka² jang diumumkan oleh Pemerintah, tanah kelebihan batas maksimum jang telah di-bagi²kan adalah 19.476.799 ha djadi kurang dari 5% daripada luas tanah melebihi batas maksimum, atau djika dipakai sebagai dasar luas tanah seluruhnja jaitu 1 djuta ha, maka sesudah 3 tahun landreform berdjalan tanah kelebihan jang sudah dibagikan tidak sampai mentjapai angka 2%, dan banjak diantaranja jang djatuh ketangan penggarap² gelap.

Banjak tindakan² dari pedjabat² daripada aparatur agraria di pusat dan di-daerah² telah sangat menghambat atau membikin matjetnja pelaksanaan UUPA dan UUPBH, tindakan² jang merugikan kaum tani dan menguntungkan tuantanah, seperti misalnja :

(1) Belum disemua Daswati I dan Daswati II telah terbentuk Panitya Landreform, dan masih ada Panitya Landreform Daswati I jang tidak mengikutsertakan wakil kaum tani jang wadjar dan progresif jaitu BTI. Sedangkan disebagian terbesar Ketjamatan² dan Desa² belum terbentuk Panitya Landreform.
(2) Panitya² Landreform jang sudah terbentuk belum dapat memenuhi tugas jang ditetapkan dalam Kepres No. 131 tahun 1961, dan pada umumnja impoten atau malahan dibekukan samasekali oleh Ketua Panitya/Kepala daerah.
(3) Sementara pedjabat Dapartemen/Djawatan Agraria dan Ketua Panitya Landreform melindungi tuantanah jang tidak melaporkan tanahnja dengan menggunakan sistim „kedok" perseorangan atau „mewakafkan" dan „menghibahkan" tanahnja ; tidak segera mensahkan sebagai hak-milik kaum tani, tanah² jang sudah dikuasai oleh negara, jaitu tanah² bekas Swapradja, kehutanan, perkebunan, tanah-partikelir, tanah RVE dan sebagainja.
(4) Dibanjak tempat telah dilakukan tindakan² salahbagi, jang bertentangan dengan Ketentuan² PP No. 224 tahun 1961

jaitu membagikan tanah bukan kepada kaum tani penggarap tanah jang berhak, akan tetapi kepada „kaum tani" bukan penggarap tanah.

(5) Dibanjak daerah tuantanah dibiarkan atau malahan „dibantu" melawan pelaksanaan UUPBH, dan sebaliknja kaum tani jang mempertahankan tanah garapan tidak djarang dituntut kedepan pengadilan dengan alasan „merampas tanah hak milik orang lain".

Tentang perkembangan daripada pelaksanaan UUPBH dapat diterangkan, bahwa dari lebih kurang 1 djuta surat perdjandjian bagihasil jang diperkirakan sudah harus selesai dikerdjakan, baru lebih kurang 43.000 surat jang sudah selesai, djadi baru 4,3% dari djumlah surat² seluruhnja.

Kematjetan pelaksanaan UUPA dan UUPBH setjara politik dan ekonomis, bukan sadja merugikan pemerintah sendiri, akan tetapi djuga merugikan kaum tani, merugikan Revolusi dan hanja menguntungkan tuantanah dan kakitangan²nja, kaum tengkulak, kaum kapitalis birokrat, dan kaum reaksioner kontra-revolusi. Menurut perhitungan, Pemerintah telah kehilangan lebih kurang 1,25 djuta ton padi akibat matjetnja pelaksanaan UUPA, berupa setoran sewa sebanjak 12,5 kwintal padi setiap ha setahun.

Untuk melantjarkan djalan pelaksanaan UUPA dan UUPBH, maka saja menjokong sepenuhnja tuntutan Partai jang telah dikemukakan dalam Laporan Politik Kawan Ketua jaitu perombakan organisasi, rituling aparatur dan personalia bagian² tertentu Departemen/Djawatan Pertanian dan Agraria, dan mempertjepat pembentukan Panitya² Landreform sampai ke-Ketjamatan² dan Desa² jang mentjerminkan kegotongrojongan nasional jang berporoskan Nasakom.

Selama landreform matjet seperti sekarang ini, maka tugas² untuk meningkatkan produksi pangan, chususnja beras dan untuk melaksanakan pembangunan berentjana akan mendjadi omongkosong belaka.

Tugas jang urgen harus segera dikerdjakan oleh Pemerintah sekarang ini untuk mengatasi krisis beras adalah memobilisasi Rakjat lewat Front Nasional Pusat dan Pemerintah sampai kedaerah² dan desa² untuk membebaskan persediaan beras jang masih tertimbun dalam gudang² dan tempat² lainnja di-kota² dan di-desa² dari penguasaan dan penggunaan oleh tuantanah, kaum kapitalis birokrat, kaum spekulan dan kaum penghisap besar lainnja, guna menguasai sepenuhnja persediaan beras itu. Dan Rakjat sendiri dengan melalui Front Nasional setempat harus bergerak untuk menggunakan persediaan padi dan beras itu jang berada

ditangan tuantanah dan tanikaja jang berlebihan, sebagai pindjaman tanpa bunga, terutama untuk makan dan bibit. Kepala desa setempat harus didorong untuk mengambil tindakan seperlunja melegalisasi tuntutan Rakjat itu.

Disamping itu Pemerintah harus tetap mendjamin distribusi beras kepada seluruh pegawai negeri dan pekerdja harian negara, memberikan segera „injeksi" beras dan bibit kepada daerah² jang menderita dan kepada penduduk kota² besar diseluruh Indonesia. JUBM harus diritul sampai ke-akar²nja mendjadi suatu Badan Pembelian Padi jang demokratis dan bertugas untuk mendjamin kelantjaran pembelian padi.

Susunan organisasi dan personalia Badan Pembelian Padi dari Pusat sampai ke-desa² harus mentjerminkan komposisi kekuatan Nasakom, penentuan djatah pembelian dan harga padi ditetapkan berdasarkan musjawarah dan harga umum setempat dan dapat dibajar dengan uang atau dalam bentuk barang² kebutuhan pokok kaum tani, seperti tekstil, gula, minjak kelapa, minjak tanah, alat² pertanian dan lain².

Pemerintah seharusnja djuga mendjamin pemasukan padi bagi penggilingan² beras dengan menetapkan djatah kapasitet penggilingan semaksimal mungkin, dengan memberikan bantuan seperlunja berupa spare-parts, dan lain² untuk melantjarkan dan meningkatkan kapasitet² pabrik² penggilingan.

Sudah tentu, untuk dapat merealisasi persediaan beras Pemerintah, untuk sementara dapat disetudjui usaha membeli beras dari luarnegeri. Kita harus tetap waspada terhadap permainan politik kaum imperialis, terutama Amerika Serikat jang berusaha mendjadikan soal kekurangan beras sebagai suatu alat politik untuk merongrong kedaulatan dan kebebasan RI.

Djalan jang paling praktis dan menguntungkan bagi Pemerintah jalah dengan mengadakan perdjandjian clearing dengan negeri² Nefo dimana RI untuk suatu djangka waktu tertentu dapat mendjual barang² hasil exportnja, seperti misalnja karet, kopra, dll. untuk dibajar kembali dengan beras.

Diatas se-gala²nja harus ditjegah agar soal import beras djangan sampai mendjadi objek perdagangan spekulasi.

Berdasarkan keterangan diatas, maka harus segera diambil tindakan² urgen dalam usaha mengatasi krisis beras sebagai berikut :

a. Dalam rangka usaha mendjamin persediaan beras dalam tempo jang pendek, Pemerintah ber-sama² dengan Rakjat jang terorganisasi supaja mengadakan gerakan pengumpulan beras dengan menguasai penimbunan beras dari tuantanah, tani kaja jang

berlebihan dan kaum spekulan di-kota² dan di-desa² dengan sjarat² tertentu jang bisa ditetapkan lebih landjut dan supaja mengambil tindakan keras terhadap mereka jang menolak pemeriksaan alat² negara bersama dengan Rakjat atas tempat² penjimpanan beras.

b. Dalam keadaan jang mendesak, Rakjat supaja menuntut agar persediaan padi dan beras setempat milik tuantanah, tani kaja jang berlebihan dan golongan beruang lainnja dapat digunakan untuk makan dan bibit sebagai pindjaman jang tidak berbunga. Kepala desa atau kampung melegalisasi tindakan Rakjat itu dan membantu kelantjaran serta ketertiban dalam pekerdjaan mem-bagi²kan beras.

c. Adakan kampanje di-tempat² pendjualan beras untuk menginsjafkan pedagang² beras agar tidak masuk dalam perangkap tukang² tjatut besar dan mendjual berasnja dengan harga jang pantas.

d. Lantjarkan dan djamin distribusi beras kepada semua pegawai dan pekerdja negeri, buruh perusahaan negara/swasta dan kepada penduduk di-kota² besar jang sampai sekarang sudah biasa mendapat pembagian beras; kepada pekerdja negeri dan kaum buruh jang mendapat distribusi beras kurang dari 8 kg setiap djiwa sebulan atau tidak mendapatkan distribusi samasekali, supaja diberikan pembagian beras 8 kg setiap djiwa sebulan; berikan pertolongan dalam bentuk indjeksi beras kepada daerah² jang sedang menderita kekurangan beras dan terantjam oleh bahaja kelaparan atau bahaja penjakit busung-lapar.

e. Ritul JUBM dan bentuk badan² Pembelian Padi jang demokratis dan berkomposisikan Nasakom. Tetapkan djatah pembelian padi atas dasar musjawarah dan harga pembelian padi pada tingkat harga umum setempat dan lakukan pembajaran djuga dalam bentuk barang² kebutuhan pokok kaum tani, sesuai dengan isi dan djiwa Instruksi Presiden No. 11 tahun 1961.

f. Adakan persetudjuan „Clearing" dengan negeri² Nefo untuk dapat mendjamin import beras selama waktu tertentu dengan pembajaran dengan hasil² export bahan² mentah kita, seperti karet dan timah.

g. Ritul personalia Djawatan Agraria, dan anggota² serta Ketua² Panitia Landreform jang tidak aktif dan djamin agar semua Panitia Landreform dari pusat sampai kedaerah berporoskan Nasakom, untuk melantjarkan pelaksanaan UUPA dan UU-PBH, karena tanpa landreform tidaklah mungkin kesulitan² ekonomi teratasi.

V

ATASI KEMATJETAN PRODUKSI DAN KOMUNIKASI

Dalam keadaan negara sedang menghadapi banjak kesulitan dibidang moneter, maka setiap kemerosotan produksi dan kematjetan komunikasi membawa akibat lebih menjulitkan lagi situasi moneter. Telah kita ketahui semua, bahwa pengeluaran negara untuk keperluan² jang tidak produktif adalah besar, sedangkan disamping itu sedjak beberapa tahun belakangan ini, harga bahan² export kita dipasaran dunia internasional sangat merosot. Dengan bertambahnja uang jang beredar dan bersamaan dengan itu merosotnja produksi dihampir semua sektor membawa akibat bahwa djumlah volume uang jang beredar djauh lebih besar daripada volume peredaran barang, dan ini merupakan salahsatu faktor terpenting daripada apa jang dinamakan inflasi terbuka uang kertas, dengan segala konsekwensinja jang sangat kedjam jaitu kenaikan harga dengan lontjatan² jang tinggi dalam tempo jang pendek.

Akan tetapi sebaliknja inflasi terbuka ini lebih mendorong lagi naiknja harga barang² sandangpangan, bahan² baku dan penolong, spare-parts dan barang² lain untuk keperluan pembangunan, memerosotkan produksi dalamnegeri dan mempersulit persediaan barang dalamnegeri untuk keperluan masjarakat, mendorong nafsu spekulasi mendjadi lebih keras, memerosotkan dajabeli (nilai tukar) rupiah terhadap barang dan djasa dalamnegeri maupun luarnegeri (valuta asing), membikin tambah berat kehidupan ekonomi-keuangan Rakjat jang sudah menderita serta mematjetkan usaha² pelaksanaan pembangunan.

Disamping keterangan tentang meningkatnja defisit anggaran, meningkatnja pengeluaran routine, meningkatnja kredit bank dan meningkatnja djumlah uang jang beredar, djelas pula tentang merosotnja harga dan volume barang² export Indonesia dipasar dunia, merosotnja penerimaan devisen, meningkatnja ongkos djasa dan tarif pengangkutan internasional, tidak seimbangnja neratja pembajaran Indonesia jang dengan sendirinja akan mempengaruhi politik alokasi penggunaan devisen untuk import Pemerintah bagi keperluan pembangunan ekonomi (pertanian, perkebunan dan pertambangan sebagai sumber pembeajaan pembangunan), import beras, import umum, pembajaran djasa-djasa, investasi modal dibidang pembangunan dan pembajaran kembali bunga dan hutang² kepada luarnegeri.

Gambaran ini pada pokoknja mendjelaskan perkembangan ekonomi-keuangan jang suram pada tahun 1962, tahun 1961 dan tahun² sebelumnja, suatu gambaran jang tjukup memberikan kesimpulan betapa eratnja saling hubungan antara sektor export-import, sektor keuangan negara, sektor produksi dan komunikasi dan sektor perdagangan dalamnegeri. Dan dari gambaran ini djelas pula betapa penting dan menentukannja faktor perdagangan luarnegeri bagi aktivitet ekonomi nasional kita, dan betapa besarnja bahaja jang ditimbulkan oleh tindakan moneter-konvensionil jang ditudjukan „untuk memperbaiki keuangan negara", berdasarkan perkembangan perdagangan luarnegeri se-mata² dengan mengorbankan produksi disemua sektor ekonomi.

Produksi beras misalnja jang direntjanakan dalam tahun 1962 sebanjak 10,2 djuta ton, sehingga Indonesia akan dapat mengexport lebih kurang 150.000 ton ternjata tidak tertjapai samasekali. Sebaliknja, Indonesia malahan masih djuga terpaksa mengimport beras tidak kurang dari 1,3 djuta ton, dan dari sini sebetulnja sudah dapat kita perhitungkan bahwa produksi beras tahun 1962 tidak bertambah dibandingkan dengan produksi tahun 1960.

Produksi tekstil tahun 1963 menundjukkan suatu gambaran jang suram, karena alat² produksi tekstil, ATM dan ATBM hanja bekerdja dengan kapasitet tidak lebih daripada 420 djuta meter atau lebihkurang 60% daripada maksimum kapasitet jang semestinja dapat digerakkan. Produksi gula tahun ini menurut kabar malahan mentjapai tingkat jang djauh lebih rendah daripada jang direntjanakan, dan tidak melebihi produksi tahun 1962 sebanjak 591.000 ton atau lebihkurang 69% produksi tahun 1959.

Demikianlah selandjutnja dapat dikemukakan bahwa produksi minjak kelapa hanja mentjapai lebih kurang 40% daripada kapasitet normal jang biasanja tertjapai dalam tahun² sebelum tahun 1960. Angka² daripada hasil² produksi perkebunan negara tahun 1961 djika dibandingkan dengan produksi tahun 1957 pada umumnja sangat merosot: produksi karet dalam tahun 1961 misalnja djika dibandingkan dengan produksi tahun 1957 merosot dengan 16%, gula dengan 24%, kapok bersih dengan 30%, serat dengan 30%, tembakau dengan 24%, bidji sawit dengan 20,8% dan kina dengan 22,5%. Hanja produksi kopi sadja telah naik selama 4 tahun itu dengan 29,33%.

Menurut tjatatan terachir produksi karet perkebunan dalam tahun 1962 sangat merosot jaitu dari 216.772 ton dalam tahun 1961 mendjadi 190.539 ton dalam tahun 1962, djadi merosot dengan 26.233 ton.

Angka² tentang produksi kopra tahun 1962 tidak tersedia akan

tetapi export kopra tahun 1962 sangat merosot jaitu dari 238.503 ton dalam tahun 1961 mendjadi 90.400 ton dalam tahun 1962 atau merosot dengan tidak kurang dari 60%.

Produksi batubara tahun 1956 dan sebelumnja setjara nasional bergerak antara 800.000-900.000 ton akan tetapi sedjak tahun 1957 terus merosot mendjadi 500.000-700.000 setiap tahunnja, dan produksi TABA di Tandjungenim jang dalam tahun 1962 direntjanakan akan mentjapai 528.000 ton hanja mentjapai 300.000 ton.

Angka² produksi timah sebagai salahsatu bahan export jang terpenting djuga tidak menggembirakan. Produksi tahun 1955 sebanjak 33.901 ton terus mengalami kemerosotan mendjadi 22.957 ton dalam tahun 1960 dan lebih kurang 11.000 ton dalam tahun 1962, djadi dalam tempo dua tahun telah merosot dengan lebih dari 50%.

Keadaan transport dalam tahun² terachir ini ternjata tidak dapat mendjamin kelantjaran distribusi barang² sandangpangan dan bahan² untuk pembangunan projek² jang telah direntjanakan oleh MPRS. Sebagai akibat dari politik moneter jang se-mata² mendasarkan diri pada perkembangan export, maka timbul banjak kerusakan² dan stagnasi dibidang transport karena alat² pengangkutan jang sudah lama tidak diberikan kesempatan untuk memperbaiki atau memperbaharui spare-partsnja.

Dibidang perkereta-apian kita melihat misalnja lok² semakin berkurang dan banjak jang sudah tua; djumlah gerbong² barang tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan banjak jang telah rusak, sedangkan rel² belum direhabilitasi.

Dalam pada itu situasi daripada kendaraan bermotor tidak kalah suramnja, pada achir tahun jang lalu tersiar kabar, bahwa di Djawa Barat 75% daripada kendaraan umum bermotor terpaksa „digantung" dan setjara nasional menurut taksiran tidak kurang dari 50% kendaraan umum bermotor telah nongkrong.

Pengangkutan dilaut meskipun djumlah tenaganja sudah seimbang dengan target jang ditetapkan oleh MPRS, akan tetapi ternjata masih mengalami kematjetan². Hal ini disebabkan karena terlalu banjak peraturan² jang bersimpang-siur dipelabuhan dengan akibat kurang djelasnja batas² wewenang antara kekuasaan sivil dan militer, terlalu banjaknja instansi² jang merasa diri paling bertanggungdjawab, kurangnja fasilitet², seperti pergudangan, dermaga dan dok. Menurut sumber² jang dapat dipertjaja, maka hanja 50% daripada alat² pengangkutan negara dibidang maritim dapat berdjalan, sedangkan jang 50% lainnja terpaksa nongkrong dengan memakan biaja pemeliharaan jang tidak sedikit jaitu $ 9

djuta setiap tahun. Akan tetapi dari djumlah kekuatan jang „dapat berlajar" itu, tidak semuanja digunakan setjara efektif. Menurut taksiran perbandingan antara djumlah kapal² berlajar dan djumlah kapal² jang terpaksa menunggu dipelabuhan adalah 1 : 2.

Jang membikin lebih gawat dan kompleksnja situasi ekonomi sekarang ini adalah kenjataan bukan sadja turunnja nilai export dengan akibat turunnja nilai import barang² modal, bahan² baku dan penolong, bukan sadja selalu ditempuhnja politik moneter konvensionil jang sudah usang itu, bukan sadja kenjataan adanja pengeluaran² negara jang kurang produktif, akan tetapi djuga karena meradjalelanja penjakit salahurus. Dan salahurus atau mismanagement ini disebabkan oleh salahtundjuk dari kaum kapitalis birokrat dengan akibat salahduduknja orang² jang tidak betjus, orang² jang korup, orang² bekas Soska-Masjumi jang anti-Manipol dan anti-Dekon.

Salahurus itu jang telah meradjalela dihampir semua sektor ekonomi negara, telah meratjuni setjara ekonomi, politik dan mental perusahaan² produksi, komunikasi, perdagangan luar dan dalamnegeri, keuangan, perusahaan tjampuran, maupun bidang² organisasi distribusi jang resmi dan setengah resmi, sehingga berakibat (a) timbulnja kepintjangan² sosial dengan adanja kenjataan disatu fihak meluas dan meratanja kemiskinan dan kesengsaraan dikalangan massa Rakjat pekerdja, dan difihak lain adanja OKB² jaitu orang² kaja baru atau orang² jang sudah „binnen" menurut istilah Presiden, dan (b) kenjataan adanja pemborosan uang, tenaga dan alat², serta ongkos produksi jang tinggi, akan tetapi tidak disertai kenaikan upah kaum buruh, dan kenaikan produksi, dan (c) meradjalelanja korupsi, pentjolengan² dan birokrasi setjara besar²an dan dalam matjam² bentuk dan manifestasinja.

Dan OKB² ini jang telah memperkaja diri dengan menggunakan atau lebih tepat lagi mensalahgunakan kedudukannja dengan akibat²nja seperti disebutkan diatas, adalah orang² jang oleh umum dan terutama dikalangan kaum buruh terkenal dengan istilah kaum kapitalis birokrat, baik militer maupun sivil. Kaum kapitalis birokrat ini, sangat dihinggapi oleh komunisto-phobi, buruh-phobi, Rakjat-phobi, dan phobi² lainnja, jang kerdjanja mengekang hak² demokratis, dan dengan begitu sangat menghambat atau menghalang²i perkembangan tenaga produktif kaum buruh dan kaum tani. Mereka karenanja adalah reaksioner dan kontra-revolusioner.

Peraturan² Ekonomi 26 Mei lahirnja tidak setjara kebetulan. Ketjuali ia lahir atas dorongan untuk sebanjak mungkin mendapatkan „bantuan" dolar dari Amerika Serikat, sekaligus merupakan suatu manifestasi daripada kapitalis-birokratisme jang dengan

sadar dan berentjana berusaha lebih merusak dan mengatjaukan lagi perekonomian nasional kita.

Dalam keadaan Indonesia sedang dilanda oleh arusnja krisis moneter jang bergabung dengan krisis kemerosotan produksi dan matjetnja distribusi-komunikasi, maka Peraturan² 26 Mei telah lebih memperdalam krisis ekonomi itu. Dengan melondjaknja ongkos produksi disemua sektor, merosotnja dajabeli rupiah dan dajabeli Rakjat, dengan naiknja harga dan tarif, dengan semakin bertambahnja defisit anggaran belandja Negara, maka produksi akan mengalami kemerosotan lagi jang lebih hebat dan bersamaan dengan itu harga barang² kebutuhan pokok akan me-londjak² lagi. „Regane sojo ndedel, tansah ora keno ditjekel", begitulah bisikan jang sering terdengar dikalangan Rakjat.

Bukanlah suatu hal jang kebetulan, bahwa jang paling getol dan bersemangat untuk menjokong Peraturan² Ekonomi 26 Mei adalah kaum Soksi-is, kaum reaksioner dan kontra-revolusioner jang tampil dengan sembojan : „Hanja tukang tjatut jang mati kutu, karena Peraturan² Ekonomi 26 Mei".

Rakjat Indonesia jang sudah tinggi kesadaran politiknja, telah lama menetapkan sasaran aksi²nja setjara tepat dalam perdjuangannja untuk merehabilisasi dan menormalkan proses perkembangan produksi dan komunikasi, jaitu menuntut agar perusahaan² negara dibersihkan dari elemen² kapitalisme birokrasi, elemen² anti-Rakjat dan anti-Manipol dan anti-persatuan nasional jang revolusioner.

Gerakan „tundjuk hidung" jaitu menundjuk setjara langsung orang² jang bertanggungdjawab dalam perusahaan jang perbuatannja terang merugikan negara dan Rakjat, telah memberikan hasil² jang memuaskan.

Sekarang sudah datang saatnja untuk mengadakan kampanje jang luas berdasarkan pengalaman² Rakjat sendiri, guna menelandjangi musuh² negara dan Rakjat jang masih bertjokol dalam badan² ekonomi dan keuangan, setjara litjin bersembunji dibelakang kedok „Manipol-Usdek" dan dibelakang konfrontasi terhadap Malaysia, tetapi jang sekarang sudah terbuka kedoknja sebagai konseptor² dan pembela² teror Peraturan² Ekonomi 26 Mei; mengadakan aksi² massa jang luas ber-sama² dengan golongan² lainnja jang demokratis dan progresif, untuk menuntut retuling aparatur dan personalia pada badan² ekonomi dan keuangan, pada badan² Pemerintahan dari pusat sampai ke-daerah². Aksi² sedemikian itu adalah adil, wadjar dan masuk-akal, dan frontnja adalah tjukup luas. Keputusan² PB FN, terutama Pantja Program dengan perintjiannja, keputusan²nja tanggal 5-6 September dan keputusan Mu-

bes Angkatan 45 baru² ini merupakan pedoman aksi jang umum dan jang akan sangat membantu melantjarkan aksi² itu.

Bersamaan dengan itu kaum buruh dan kaum tani harus mengkonsolidasi kemenangan² jang sudah tertjapai dan mengembangkannja lebih landjut.

Dewan² Perusahaan Negara dibidang perkebunan, pertanian, industri dan perdagangan harus meluaskan tugas²nja jang sekarang ini masih sangat terbatas.

Dewan² Perusahaan itu seharusnja merupakan suatu alat „social-control" jang efisien; merupakan alat bagi Rakjat pekerdja, kaum buruh dan kaum tani, untuk mengembangkan alat² produksi dan mentjapai daja-produksi setjara maksimal, untuk melawan sabotase kaum reaksioner dan kaum subversi, dan untuk dapat meng-'kiprahkan' Rakjat pekerdja sendiri. Sudah tentu ini semuanja harus dilakukan dalam suasana kompetisi Manipolis diantara semua golongan² dan orang² pendukung Manipol jang sedjati.

Berdasarkan keterangan diatas, maka harus segera dilakukan tindakan² dibidang produksi dan komunikasi sbb :

a. 1. Adakan gerakan massa luas untuk rehabilitasi aparat produksi dan komunikasi dan berikan tanggungdjawab kepada kaum buruh dan kaum tani atas pemeliharaan dan pengusahaan aparat² itu. Pemerintah harus menjediakan devisen jang tjukup untuk keperluan mengimport barang² modal, bahan² baku dan penolong.
   2. Lantjarkan dan perbesar kapasitet hubungan telekomunikasi. Lantjarkan dan tertibkan lalulintas barang di-daerah² pelabuhan, chususnja di-daerah² pelabuhan utama dengan mempertjepat djalannja bongkar/muat dan memperbesar kapasitet pelabuhan. Laksanakan dengan sungguh² prinsip demokrasi terpimpin dalam mewudjudkan pimpinan jang efisien dan produktif atas segala bentuk aktivitet di-pelabuhan².
b. Adakan kompetisi Manipolis untuk memenuhi target produksi dan alat² telekomunikasi berdasarkan prinsip prioritet projek² dan rentjana² jang telah ditetapkan oleh MPRS. Lawan setiap usaha untuk meliberalisasi pelaksanaan projek² produksi dan komunikasi.
c. Bentuk Dewan Produksi jang berkomposisikan Nasakom dibawah Pimpinan Presiden Sukarno jang bertugas membikin rentjana pelaksanaan tahunan setjara terperintji dengan memberikan perhatian chusus kepada usaha memperbesar produksi pertanian, terutama beras, perkebunan terutama karet dan kopra, pertambangan terutama timah, dll.

d. Berantas salahurus dan salahduduk dan lawan salahtundjuk, melalui kampanje berentjana untuk menelandjangi perbuatan² tjurang dan korup pentjoleng² negara, kaum kapitalis birokrat dan elemen² subversi bekas² Soska-Masjumi jang bersarang dibanjak badan² ekonomi dan keuangan. Adakan retuling dan perombakan aparatur serta personalia pada badan² itu dan ganti tukang² salahurus jang salahduduk karena salahtundjuk, dengan tenaga² jang patriotik, Manipolis² sedjati dan bertjita² Sosialisme Indonesia jang ilmiah.
e. Adakan demokratisering dalam kontrol, dengan melakukan tjara² pengurusan perusahaan jang terbuka, berikan tugas² kepada Dewan Perusahaan jang kongkrit dan efisien sehingga dapat mendjamin setjara maksimal hasil² kerdjasama dan musjawarah antara wakil² kaum buruh dan kaum tani dengan tenaga² ahli jang Manipolis sedjati.
f. Ambilalih perusahaan² perkebunan dan perminjakan Inggris, dan mengubah apa jang dinamakan „Perdjandjian Karya" antara PN² RI dengan kongsi² minjak raksasa asing, sehingga sesuai dengan prinsip² production sharing berdasarkan kredit dengan bunga jang rendah dan saling menguntungkan sebagaimana telah dirumuskan dalam keputusan KOTOE beberapa bulan jang lalu. Kuasai sepenuhnja devisen jang dihasilkan oleh perusahaan² monopoli minjak Stanvac dan Caltex.
g. Pemerintah supaja menetapkan target² produksi perusahaan² penggilingan padi, sesuai dengan kapasitet maksimal jang dapat ditjapai, dan mendjamin persediaan padi di-tempat² penggilingan.
h. Badan² „Koperasi" jang bersifat kapitalis supaja dibubarkan, dan bentuk sebanjak mungkin koperasi produksi jang progresif disektor pertanian, perikanan, dan perindustrian ketjil.

VI

TOLAK „BANTUAN" DARI MANAPUN JANG MERUGIKAN INDONESIA

Mengenai apa jang dinamakan „bantuan" dari negara² jang dikuasai oleh OLDEFO, terutama AS dan Inggris, pada waktu achir² ini nampak perkembangan jang baik dalam djalan fikiran sementara orang dan golongan jang mula², sedar atau tidak sedar, mendukung sikap kaum reaksioner jang berpendapat setjara prinsipiil bahwa „bantuan" dari negara imperialis atau negara² OLDEFO itu adalah mutlak diperlukan dengan dalih, bahwa „Indo-

nesia kekurangan tenaga² ahli jang berpengalaman dan berkaliber internasional", „Indonesia kekurangan modal", „Indonesia masih sangat terbelakang", dan lain² sebagainja.

Sedjak dulu kita berpendirian, bahwa kita bisa menerima setiap bantuan darimanapun djuga asalkan tidak disertai dengan sjarat² baik politik, ekonomi maupun militer, akan tetapi sebaliknja kita menolak dan menentang keras setiap „bantuan" jang ditjekokkan kepada Indonesia dengan matjam² sjarat jang mengikat dan merugikan itu.

Pengalaman² membuktikan bahwa sikap jang kita ambil itu adalah benar dan tepat. Sebagai tjontoh jang kongkrit dan sangat menjolok adalah pengalaman kita sekitar Peraturan² Ekonomi 26 Mei jang sudah kita kenal itu.

Didepan Sidang Pleno DPR-GR tanggal 12 Desember 1963 itu, sebagaimana telah kita ketahui semua, Wakil Perdana Menteri I Dr. Subandrio menerangkan, bahwa Peraturan² 26 Mei sudah gagal samasekali, karena terlalu didasarkan pada harapan² untuk mendapatkan ber-djuta² dolar. Sekarang timbul pertanjaan, mengapa ber-djuta² dolar jang di-harap²kan itu tidak kundjung muntjul djuga ?

Kaum imperialis, memang bukan imperialis kalau tidak terlalu serakah atau terlalu murka. Sebab Peraturan² 26 Mei sendiri sebetulnja sudah merupakan udjud daripada sjarat² bagi „bantuan" jang telah mereka djandjikan itu. Devaluasi, liberalisasi harga, dengan akibat inflasi jang lebih menghebat lagi, itulah sebetulnja sjarat² jang telah ditjekokkan oleh kaum imperialis dalam bentuk Peraturan² 26 Mei kepada Indonesia, untuk dapat menerima „bantuan" jang disanggupkan sebanjak tidak kurang dari AS $ 300-400 djuta.

Akan tetapi rupa²nja sjarat itu belum tjukup. Disamping itu kaum imperialis menekankan sebagai sjarat mutlak agar Indonesia membebek sadja kepada politik reaksioner dan agresif kaum imperialis, chususnja politik neo-kolonial Inggris jang disokong oleh imperialis AS jang telah menelorkan projek „Malaysia" itu.

Hal ini, pertama bisa dibuktikan dari saran Djenderal L.C. Clay, penasehat almarhum Presiden Kennedy, beberapa saat sesudah DEKON diamanatkan oleh Presiden Sukarno, dan beberapa minggu sebelum berlakunja Peraturan² Ekonomi 26 Mei dalam suasana jang hangat dan tjukup tadjam jang meliputi rentjana agresif kaum imperialis Inggris, untuk mendirikan „Malaysia".

Pada waktu itu Djenderal Clay memberikan saran, agar Indonesia djangan diberikan „bantuan ekonomi", sebelum Indonesia mau menghentikan „petualangan² internasionalnja" (maksudnja

perlawanan Rakjat terhadap gagasan pembentukan „Malaysia", dan terhadap kaum imperialis pada umumnja).

Bukti jang kedua dapat kita lihat dari kenjataan, bahwa pada tanggal 27 Djuli jang lalu, di Paris telah diadakan pertemuan besar antara anggota DAC (Development Assistance Committee) jang terdiri semuanja dari negara² OLDEFO jaitu Amerika Serikat, Inggris, Perantjis, Djerman Barat, Italia, Nederland, Portugal, Belgia dan Norwegia guna membitjarakan persiapan² pemberian „bantuan" sebanjak $ 300-400 djuta, kepada Indonesia dengan maksud „untuk menstabilisasi ekonomi dan bidang keuangannja" (jang dimaksud jalah Peraturan² 26 Mei). Amerika sendiri menurut berita „Reuter" tanggal 27 September menjanggupkan untuk sedikit²nja memberikan „sumbangan" $ 200 djuta. Akan tetapi berita „Reuter" itu lebih landjut mengemukakan, bahwa „rentjana memberikan" bantuan itu, untuk sementara dibekukan, **sambil menunggu penindjauan kembali sikap Indonesia terhadap „Federasi Malaysia".**

Djadi „bantuan" sebanjak $ 300-400 djuta jang disanggupkan oleh kaum imperialis dan neo-kolonialis itu, disamping disertai sjarat² ekonomi jang sudah dituangkan dalam Peraturan² 26 Mei, djuga disertai sjarat² politik jang sangat prinsipiil dalam hubungan dengan pembentukan „Malaysia".

Dan bagaimanakah sikap kaum reaksioner Amerika Serikat, setelah pada waktu sekarang ini perdjuangan Rakjat Indonesia, untuk melawan dan menghantjurkan projek neo-kolonial „Malaysia" semakin memuntjak dan semakin tegas ?

Ketika di Washington sedang ramai²nja dibitjarakan „bantuan" luarnegeri dalam Kongres Amerika Serikat, maka pedjabat AID (Agency for International Development) Amerika Serikat di Djakarta berusaha untuk lebih mengatjaukan lagi suasana Kongres dengan mengatakan bahwa „ada bantuan jang diberikan kepada Indonesia jang tidak senonoh", dan sementara itu harian reaksioner „New York Herald Tribune" menulis, bahwa „reaksi Indonesia terhadap Malaysia jang sangat keras tidaklah mengherankan sebab disatu fihak „Malaysia" bertudjuan untuk mendjadi penghalang terhadap „expansionisme Sukarno" dan difihak lain terhadap „expansionisme sahabat Sukarno, jalah Mao Tse Tung".

Bukan sadja terhadap Indonesia, akan tetapi djuga terhadap Filipina jang telah hidup dalam dominasi kaum imperialis Amerika, Amerika telah menundjukkan sikap jang reaksioner dan kepala batu dengan mengantjam hendak memberhentikan semua „bantuan" kepada Filipina, apabila negara ini tidak merubah pendiriannja terhadap „Malaysia".

Akan tetapi tidak ada sendjata reaksioner kaum imperialis jang tidak merupakan bumerang terhadap kaum imperialis sendiri. „Bantuan" mereka kepada negara² jang sedang berkembang jang digembar-gemborkan sebagai usaha² filantropis, guna „membantu negara² tersebut mengembangkan ekonomi nasionalnja dan memberikan makanan (sic) kepada ratusan djuta Rakjat jang kelaparan", ternjata malahan telah mentjiptakan sjarat² objektif jang menelandjangi maksud² djahat mereka sendiri.

Dari Kenya, melalui Pakistan, Sri Langka, Kambodja dll. sampai ke Argentina, golongan² jang berkuasa di-negara² jang baru berkembang sudah mulai bangkit membuka kedok „bantuan" jang diberikan oleh kaum imperialis Amerika Serikat.

Belum lama berselang Presiden Pakistan Djenderal Ajub Khan telah mengatakan bahwa „bantuan" jang diberikan oleh Barat dengan tangan kiri, diambilnja kembali dengan tangan kanannja dalam bentuk jang lebih luas lagi.

Dan baru beberapa hari jang lalu harian Kambodja „La Depeche Cambodge" menulis, bahwa „bantuan" AS adalah tipuan belaka. Dan telah kita ketahui, bahwa Pangeran Sihanouk telah menjatakan menolak „bantuan" dari AS, baik militer maupun ekonomi.

Pengalaman mengenai „bantuan" jang telah didjandjikan oleh kaum imperialis dengan sjarat² jang berbentuk Peraturan² 26 Mei adalah suatu pengalaman jang sangat pahit dan tragis, sebab sebelum „bantuan" itu bisa diterima sudah dipaksakan lebih dulu sjarat²nja jang sangat merugikan karena ternjata telah menggontjangkan sendi² perekonomian kita jang sudah tjukup labil ini.

Bagaimanakah sikap kita terhadap „bantuan" jang sudah dan masih akan diberikan oleh Amerika maupun jang diberikan oleh Inggris berdasarkan perdjandjian² jang telah dibuat oleh negara² tersebut dengan RI ?

Adalah tepat keputusan jang telah diambil oleh Pemerintah untuk menghentikan „bantuan" ekonomi dari beberapa negeri asing dalam rangka rentjana Kolombo jaitu antara lain dari Australia, karena sudah ternjata „bantuan" itu digunakan sebagai alat untuk memaksakan politik mereka dalam soal „Malaysia".

Sekarang sudah tjukup alasan bagi Pemerintah untuk mengambil sikap terhadap „bantuan" dari Amerika Serikat, lebih² setelah setjara resmi AS dengan perantaraan dutabesarnja di Kuala Lumpur, Tuan Charles Baldwin, memberitahukan kepada apa jang dinamakan „PM Pemerintah Malaysia" si Tengku Abdul Rachman, bahwa AS tidak akan memberikan bantuan militer dan ekonomi jang baru kepada Indonesia.

Berdasarkan bukti² jang terang dan njata bahwa Amerika Serikat menggunakan soal „bantuan" sebagai alat untuk memaksakan politiknja jang reaksioner kepada Indonesia, maka sudah pada tempatnja dan djuga tepat pada saatnja apabila Pemerintah membatalkan semua rentjana „bantuan" dari AS jang sudah ditetapkan dalam persetudjuan² dan belum direalisasi jaitu misalnja persetudjuan dengan ACA (Agricultural Commodities Agreement) untuk tahun 1962-1964 sebanjak AS $ 127,2 djuta, dan bersamaan dengan itu menjatakan setjara resmi untuk menolak semua „bantuan" jang baru dari AS.

Sebagaimana telah diterangkan oleh Presiden Sukarno dalam GESURI, maka Indonesia tidak akan mengemis-ngemis bantuan dari luarnegeri dan akan menolak setiap „bantuan" jang ditjekokkan dengan sjarat².

„Bantuan" dari negara² jang dikuasai oleh OLDEFO jang dikepalai oleh imperialis Amerika Serikat ketjuali selalu disertai dengan sjarat² politik seperti telah dikatakan lebih dulu, djuga selalu disertai dengan sjarat² ekonomi sehingga dengan „bantuan" jang sudah sangat banjak dari Amerika itu, Indonesia masih tetap merupakan negeri jang ekonominja sangat tergantung kepada negeri asing, karena dari „bantuan" sebanjak AS $ 630 djuta tidak ada samasekali jang berupa mesin² jang diperlukan untuk industri berat, dan hampir 50% dari semua pindjaman itu, jaitu pindjaman dari ACA sebanjak AS $ 314 djuta terdiri se-mata² dari bahan² hasil pertanian seperti beras, tepung terigu, kapas, tembakau dan bahan² inipun harus diangkut oleh alat² pengangkutan laut dari Amerika jang ongkosnja ditanggung oleh Indonesia.

Dan kaum imperialis sendiri, terutama Amerika Serikat tidak pernah menjembunjikan maksud²nja jang djahat daripada „bantuan" jang mereka berikan kepada negara² jang baru berkembang. Baru² ini Menteri Luarnegeri AS Dean Rusk menjatakan dengan terus terang bahwa „bantuan" AS adalah alat politik jang paling ampuh untuk melaksanakan politik luarnegeri dengan hasil² jang memuaskan.

Dan terhadap utjapan Dean Rusk ini Rakjat Indonesia hanja mengenal satu djawaban dalam bahasa jang sederhana : adalah hak tuan untuk berbitjara begitu, akan tetapi adalah hak Rakjat Indonesia pula untuk menolak setiap „bantuan" dari negeri tuan, karena „bantuan" itu ternjata hanja membawa akibat malapetaka dan kemiskinan jang lebih merata bagi Rakjat Indonesia.

VII

TERUSKAN PEMBANGUNAN BERENTJANA JANG DEMOKRATIS DAN PATRIOTIK

Meneruskan pembangunan tidaklah bisa berarti lain, melainkan meneruskan pembangunan berentjana berdasarkan garis² jang telah ditetapkan oleh MPRS. Dan suatu pembangunan berentjana hakekatnja adalah usaha untuk mengembangkan setjara berentjana tenaga² produktif, jaitu alat² produksi dengan tenaga² manusia, Rakjat pekerdja, jang melalui alat² produksi itu mengubah bahan² baku, bahan² penolong dan barang² modal mendjadi kekajaan materiil jang berguna bagi penjelesaian Revolusi Agustus 1945.

Adalah tepat apa jang dinjatakan dalam Dekon „kita harus mengutamakan pertanian dan perkebunan, kita harus mementingkan pertambangan, sebagai sjarat untuk menimbulkan dan menjalurkan daja-kerdja, dajakreatif Rakjat setjara maksimal".

Dan dalam Gesuri oleh Presiden Sukarno dinjatakan, bahwa „mengutamakan kenaikan produksi adalah keharusan, karenanja setjara positif harus mengembangkan tenaga produktif daripada buruh dan tani".

Djadi djelaslah mengapa kita harus mengutamakan pertanian dan perkebunan, atau dengan perkataan lain mengapa kita harus mendjadikan pertanian dan perkebunan sebagai basis pembangunan berentjana. **Pertama,** jalah karena sebagian terbesar daripada Rakjat pekerdja kita, tenaga produktif jaitu ber-puluh² djuta kaum tani dan buruhtani melakukan aktivitet produktifnja dibidang pertanian. Djadi dibidang pertanian inilah terdapat sumber tenaga manusia jang sangat luas, tenaga² produktif jang bisa mengubah tanah, sebagai kekajaan alam, mendjadi sumber nilai² materiil jang baru jaitu bahan² makanan, terutama beras, djagung, kedele, dan lain² sebagainja.

Kedua, perkebunan menghasilkan bahan² export jang sangat penting bagi negara, karena menghasilkan devisen negara jang sangat di butuhkan untuk mendatangkan bahan² baku, dan penolong dan barang² modal, barang² jang mutlak harus diimport untuk sementara, dari luarnegeri.

Ketiga, pembangunan berentjana jang berdiri diatas prinsip pertanian dan perkebunan sebagai basis, bukan sadja bisa mendjamin sumber pembeajaan pembangunan, akan tetapi sekaligus djuga merupakan sjarat mutlak untuk industrialisasi dalam djangka pandjang, dengan industri berat sebagai intinja. Melakukan industrialisasi, dengan pembangunan industri berat sebagai intinja, tanpa

bersandar kepada pertanian dan perkebunan sebagai basis, adalah omongkosong; zaman industrialisasi a la Barat, zamannja kaum tani hanja se-mata² didjadikan kudatunggangan oleh kaum burdjuis liberal, sudah lewat, dan setiap usaha untuk mengembalikan zaman itu di Indonesia pasti akan mengalami kegagalan. Industri jang dibangun dengan pertanian dan perkebunan sebagai basis akan merupakan tulangpunggung perekonomian nasional kita, dan industri jang sedemikian itu, akan meliputi djuga pertambangan sebagai sumber jang langsung daripada bahan² untuk industri berat. Untuk sementara hasil pertambangan kita, seperti timah misalnja masih merupakan bahan export jang menghasilkan devisen negara.

Apakah artinja mengembangkan tenaga produktif dibidang pertanian? Dekon telah memberikan djawaban atas persoalan ini. Jaitu membebaskan kaum tani, tanimiskin dan buruhtani dari hubungan feodal, atau dengan istilah Dekon mengikis habis sisa² feodalisme dibidang pertanian. Dan tindakan² dalam djangka pendek untuk membebaskan kaum tani dari hubungan² feodal adalah tidak lain tindakan pelaksanaan dengan konsekwen UUPA dan UUPBH dengan mengutamakan kepetingan kaum tani, seperti jang telah diuraikan dengan tandas dalam Laporan Politik Kawan Ketua. Ini adalah langkah pertama untuk melaksanakan landreform setjara radikal, sesuai dengan Program Umum Partai.

Ada sementara orang jang berpendapat bahwa andaikata landreform dilaksanakan dengan sungguh² berdasarkan UUPA, dan andaikata UUPBH djuga dilaksanakan dengan baik, maka produksi beras toh tidak akan naik, karena hal ini tidak membawa akibat perubahan luasnja tanah tanaman sebagai keseluruhan. Pendapat ini adalah tidak benar dan hakekatnja mewakili kepentingan tuantanah.

Kaum tani penggarap tanah jang dirasakan sebagai miliknja sendiri, sudah tentu dalam sjarat² lainnja jang menguntungkan, seperti teknik pengairan dan teknik penanaman jang terpimpin setjara baik, penggunaan pupuk setjara tepat, bibit unggul dan kredit jang murah dari Pemerintah, akan mengerdjakan tanahnja dengan kegairahan dan semangat jang tinggi, dan ini sudah tentu akan membawa akibat prestasi² jang lebih tinggi pula. Demikian djuga pelaksanaan UUPBH dengan baik akan mendorong kaum tani bekerdja lebih keras dan lebih giat lagi untuk memperbanjak produksi bahan² pertanian.

Menurut Dekon bukan sadja sisa² feodalisme akan tetapi djuga sisa² imperialisme harus dikikis habis. Dalam djangka pendek hal ini berarti tindakan untuk menggerowoti sisa² kekuasaan imperial-

isme di Indonesia terutama imperialisme Inggris dan Amerika Serikat. Djika imperialis Inggris tetap ngotot pada pendiriannja untuk mempertahankan projek neo-kolonialnja „Malaysia" maka harus segera diambil tindakan² untuk ambilalih modal besar Inggris dibidang perkebunan dan perminjakan. Demikian djuga sikap kita terhadap imperialis Amerika Serikat harus tegas. Sebagaimana telah dinjatakan dalam Laporan Politik Kawan Ketua, maka apa jang dinamakan „Perdjandjian Karya" harus segera dirobah sehingga sesuai dengan prinsip² production sharing jang dirumuskan dalam keputusan KOTOE beberapa bulan jang lalu. Sebab dengan perdjandjian itu berarti mendjamin berlangsungnja neo-kolonialisme dibidang perminjakan selama 30 tahun.

Tindakan² tegas untuk menggerowoti setjara kongkrit dan konsekwen sisa² imperialisme dan bersamaan dengan itu memberi hak² serta kebebasan² demokratis bagi kaum buruh disemua perusahaan, baik perusahaan negara, perusahaan swasta nasional dan domestik jang progresif, perusahaan tjampuran dan lain² berarti suatu langkah jang madju kearah pengembangan tenaga produktif kaum buruh.

Akan tetapi projek pengembangan tenaga produktif kaum buruh dan kaum tani sebagai sokoguru Revolusi, hanja bisa berhasil baik, apabila kaum buruh dan kaum tani dapat merasakan pimpinan kekuasaan politik, jaitu Kabinet RI, sebagai Kabinetnja Rakjat, dimana wakil² daripada Partai klas buruh ambil bagian setjara aktif dan riil didalamnja. Kabinet ini adalah tidak lain daripada Kabinet Gotongrojong berporoskan Nasakom dibawah pimpinan Presiden Sukarno, jang sekarang sudah mendjadi tuntutan luas dari semua golongan Rakjat jang demokratis dan progresif. Prinsip² pembentukan Kabinet Gotongrojong ini sudah dirumuskan dalam Konsepsi Presiden tanggal 21 Februari 1957 jang telah disjahkan oleh MPRS sebagai bentuk daripada Demokrasi Terpimpin, telah dirumuskan dalam Dekon dan diperintji lebih landjut oleh PB FN dan telah diterima dan disetudjui djuga pada pokoknja oleh Mubes Angkatan 45 beberapa hari jang lalu, sebagai salah-satu tuntutan Angkatan 45.

Djelasnja, untuk memperbesar produksi harus dikembangkan tenaga produktif kaum buruh dan kaum tani, dan untuk mengembangkan tenaga² produktif ini harus segera diambil langkah² melaksanakan landreform dengan konsekwen, mendjamin hak² serta kebebasan² demokratis kaum buruh dan kaum tani dan menggerowoti sisa² imperialisme, menudju kepembentukan susunan ekonomi jang patriotik, jaitu ekonomi terpimpin atau ekonomi gotongrojong jang anti-imperialis, anti-neo-kolonial dan anti-feodal,

dengan pertanian dan perkebunan sebagai basis, dan industri sebagai tulangpunggung dibawah pimpinan Kabinet Gotongrojong berporoskan Nasakom.

Pengalaman Rakjat sendiri makin memperkuat kejakinan bahwa untuk dapat mewudjudkan ekonomi terpimpin atau ekonomi gotongrojong itu harus berlaku kekuasaan politik serta aparat ekonomi jang sesuai, jaitu Kabinet Gotongrojong jang berporoskan Nasakom dan retuling aparatur ekonomi disemua tingkatan dan sektor. Konsepsi ekonomi jang baik hanja bisa dilaksanakan oleh aparatur jang baik, bukan oleh kaum Manipolis dan kaum Dekonis munafik.

Perwudjudan susunan ekonomi gotongrojong akan melalui suatu proses jang pandjang dan ini hanja akan bisa berhasil apabila diambil tindakan² djangka pendek, termasuk tindakan² urgen, jang harus diambil sekarang djuga jang pada pokoknja sudah kita rumuskan dimuka jaitu mengganjang kesulitan² ekonomi, **mengachiri penjelewengan Peraturan² 26 Mei dan memenangkan** konfrontasi ekonomi terhadap Malaysia.